

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perempuan dalam bidang politik pada dasarnya sangat besar bukan saja secara kuantitas melainkan juga kualitas. Namun demikian di banyak negara di dunia, baik maju maupun sedang berkembang, partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat terbatas. Bahkan di negara yang demokrasinya sudah mapan sekalipun, di mana perempuan sudah memainkan peranan penting dalam pemerintahan, secara hukum masih terdapat aturan-aturan yang melarang perempuan untuk terlibat dalam event-event politik dan faktor sosial budaya berbasis gender masih cenderung menghambat perempuan dalam politik.

Di Indonesia, proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan umur tahun 1995-2005, menunjukkan bahwa pemilih perempuan mempunyai potensi yang sangat besar yakni lebih dari lima puluh persen atau sejumlah 66.429.500 orang, sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 64.146.450 orang dari proyeksi jumlah pemilih tahun 1999 yaitu 130.575.950 (BPS, 1997). Pada pemilu 2009 nanti, diperkirakan komposisi pemilih berdasarkan jenis kelamin tidak akan jauh berbeda, dengan kecenderungan pemilih perempuan akan semakin banyak di bandingkan pemilih laki-laki. Jumlah pemilih perempuan yang cukup besar ini merupakan akses politik penting yang seharusnya diperhitungkan baik oleh pemerintah, partai politik maupun oleh kaum perempuan itu sendiri. Oleh karena itu keputusan politik yang dihasilkan seharusnya memberikan iklim yang dapat meningkatkan akses bagi perempuan pada semua lini kehidupan berpolitik dan bernegara melalui anggota legislatifnya, dan pejabat pemerintah sebagai pelaksana negara adalah penentu keputusan yang harus mengetahui dan memperhatikan kepentingan perempuan.

Berbeda dengan potensi kuantitas, posisi perempuan dalam kehidupan politik masih berada pada kondisi marginal.¹ Posisi marginal ini tergambar dalam data yang terlihat dalam tabel-tabel lampiran. Berbagai data hasil pemilu menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2001 hanya terdapat seorang perempuan yang mampu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Provinsi dari 27 orang ketua DPRD Provinsi, dan pada waktu yang sama hanya ada satu perempuan lain yang mampu menjadi wakil ketua 2 (dua) DPRD Provinsi. Data pada tingkat Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu jumlah perempuan yang dapat menduduki posisi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota masih sangat rendah.

Selain dalam struktur kepemimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah dan persentase perempuan sebagai anggota DPR secara total maupun berdasar partai juga masih rendah. Data lain menunjukkan bahwa secara kuantitas perempuan masih termarginalkan dalam keanggotaan DPR dan DPRD. Keanggotaan perempuan dalam lembaga legislatif masa keanggotaan 1992-1997 sebesar 12,5%, 1997-1999 sebesar 10.8%, 1999-2004 sebesar 9%, 2004-2009 sebesar 11%. Memang pada masa keanggotaan 2004-2009 terjadi peningkatan lebih dari 2% dibanding masa keanggotaan 1999-2004, tetapi tetap saja secara total belum pernah mencapai keterwakilan 15%.

Dari sisi partai, persentase tertinggi keanggotaan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) periode 2004-2009 berasal dari Partai Bintang Reformasi (selanjutnya disingkat PBR) yaitu 15,38% dari 13 orang anggotanya, disusul Partai Golongan Karya (selanjutnya disingkat Golkar) dengan 14,28% (dari 133 orang anggota DPR dari Golkar). Meski demikian tingginya persentase keanggotaan DPR dari Partai Bintang Reformasi lebih disebabkan jumlah total anggota DPR dari PBR yang sangat sedikit, yaitu 11 orang, sehingga persentase perempuan menjadi tinggi meski jumlah absolutnya hanya sedikit, yaitu 2 (dua) orang. Diantara 10 partai yang mempunyai 10 orang anggota DPR atau lebih, Partai Bulan Bintang (selanjutnya disingkat PBB) tidak memiliki seorang perempuanpun di antara 11 orang anggota DPRnya. Partai Persatuan

¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.16-17. Lihat juga Ani Widyani Soetjipto, 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hal. 2 dan hal. 15-17.

Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) hanya memiliki 5,26% sementara Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disingkat PKS) 6,66%. Persentase tersebut cenderung lebih tinggi pada partai-partai nasionalis atau nasionalis religius, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (selanjutnya disingkat PDIP), Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disingkat PKB, dan Partai Amanat Nasional (selanjutnya disingkat PAN).

Kondisi yang mirip terjadi pada masa keanggotaan 1999-2004. Persentase keterwakilan perempuan pada partai-partai agama (yaitu PBB dan PPP) serta partai nasionalis religius (PAN dan PKB) jauh lebih rendah dibanding pada partai-partai nasionalis, yaitu Partai Golkar dan PDI-P. Jika persentase keterwakilan perempuan pada masa keanggotaan DPR periode 1999-2004 diperbandingkan secara berturut-turut antara Partai Golkar: PDI-P: PPP: PKB: PAN: PBB, maka perbandingannya adalah 13,3%: 9,8%: 3,52%: 5,9%: 4,9%: dan 7,7%. Persentase di Partai Golkar dan PDI-P jauh lebih tinggi dibanding dengan persentase di PPP, PKB, PAN dan PBB.

Merujuk pada keterwakilan perempuan di DPR masa 1999-2004 dan 2004-2009 yang sudah dikemukakan dalam paragraf-paragraf terdahulu, dapat dinyatakan bahwa perempuan masih merupakan minoritas dalam struktur kekuasaan di DPR. Posisi minoritas tersebut cenderung terjadi pada: (1) partai-partai agama, dan (2) partai-partai nasionalis religius.² Data ini memperkuat argumen Siti Musdah Mulia dan Anik Farida bahwa perempuan merupakan minoritas dalam kehidupan politik karena memang benar-benar masih memiliki masalah dengan posisi mereka dalam struktur kekuasaan di DPR dan partai-partai, khususnya partai-partai Islam. Alasan yang mendasari argumen Musdah Mulia dan Farida bahwa perempuan masih menjadi minoritas dalam kehidupan politik adalah bahwa dalam pemilu yang menggunakan sistim proporsional daftar tertutup (pemilu legislatif 1999 dan 2004 menggunakan sistim ini), maka sedikitnya jumlah perempuan di DPR disebabkan oleh tidak diletakkannya perempuan dalam posisi yang menguntungkan dalam daftar calon usulan partai yang memungkinkan mereka terpilih dalam pemilu. Karena itu dapat disimpulkan bahwa sedikitnya jumlah dan persentase

² Disertasi ini tidak secara khusus membahas perbedaan partai-partai agama dan partai-partai nasionalis religius.

perempuan di DPR merupakan indikator kuat masih lemahnya posisi perempuan dalam partai sehingga tidak memiliki daya tawar untuk dicalonkan pada posisi yang memungkinkan terpilih menjadi anggota DPR.³

Lemahnya peran perempuan dalam kehidupan politik, khususnya di partai, dan lebih khusus lagi di partai Islam berupa sedikitnya perempuan yang dapat menduduki berbagai jabatan penting di partai dan sedikitnya perempuan yang dapat menduduki kursi DPR sebagai wakil partai di lembaga perwakilan rakyat merupakan fenomena yang akan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi. Hal ini terlihat dari pernyataan Inter-Parliamentary Union berikut⁴:

The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences. (Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan sebuah kemitraan yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan berbagai urusan kemasyarakatan dalam kondisi saling bekerjasama secara setara dan saling melengkapi, dengan saling memperkaya atas dasar perbedaan yang ada di antara mereka).

Begitu pentingnya peran perempuan dalam kehidupan politik sehingga dinilai berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan urusan-urusan masyarakat atas dasar saling melengkapi karena perbedaan yang ada di antara perempuan dan laki-laki. Dua prinsip penting terdapat dalam deklarasi ini. Pertama, kerjasama yang sungguh-sungguh antara perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan politik adalah prasyarat demokrasi. Kedua, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kekuatan yang harus saling melengkapi untuk melaksanakan urusan masyarakat, bukan alasan diskriminasi terhadap perempuan seperti selama ini terjadi.

Namun demikian, kenyataan yang amat memprihatinkan adalah bahwa keterwakilan perempuan dalam badan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan populasi perempuan itu sendiri. Perempuan yang menjadi wakil rakyat tersebut diperkirakan masih berkisar 10% dari total anggota

³ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Loc. Cit.*

⁴ Inter-Parliamentary Union, "Reports and Documents", No. 35, 1999, ISBN 92-942-065-2

legislatif yang ada. Dari aspek kualitasnya, kiprah perempuan sebagai anggota parlemen masih perlu dipertanyakan. Pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan adalah seberapa besar kemampuan mereka dalam mengagendakan berbagai isu ketidakadilan yang menimpa perempuan ke dalam berbagai kebijakan publik strategis? Pertanyaan ini masih relevan mengingat masih terdapat banyak hambatan struktural dan sosio-kultural dalam perjuangan hak-hak perempuan. Minimnya pengetahuan teknis perempuan anggota parlemen misalnya mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, merupakan barikade pertama yang menghambat perjuangan hak-hak perempuan. Selain itu kendala sosio-kultural lain yang menghambat kiprah perempuan dalam parlemen adalah seperti: kurangnya dukungan kalangan perempuan, kurangnya dukungan laki-laki-laki, ketakutan untuk di *recall*, keterbatasan pengetahuan, kesulitan dalam mengagendakan di dewan, serta keyakinan bahwa apa yang akan diperjuangkan tidak akan mendapat dukungan di dewan.

Jika perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih banyak menghadapi kendala kultural dan kuatnya ideologi patriarkhi, maka dapat diperkirakan bahwa hambatan tersebut akan lebih besar dihadapi perempuan pada umumnya ketika mereka akan memasuki dunia politik. Rintangan kultural yang sering muncul misalnya adalah pelabelan (stereotipe) terhadap perempuan. Masyarakat kita cenderung skeptis ketika melihat penampilan sosok perempuan di wilayah publik (dunia politik). Suara-suara sumbang terhadap diskursus kuota 30% perempuan di parlemen beberapa waktu yang lalu merupakan bukti skeptisisme tersebut. Kendala kultural lain misalnya adalah rendahnya akses perempuan terhadap informasi yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kemiskinan, pola kerja perempuan yang terbatas pada ranah domestik, dan ketrampilan teknis seperti kemampuan berbahasa.

Harapan peningkatan peran politik perempuan muncul ketika dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang baru dinyatakan adanya kuota 30% suara perempuan dalam lembaga legislatif. Akan tetapi aturan baru itu belum mampu menjamin secara riil keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut. Hal ini mengingat undang-undang tersebut masih mengandung problematika pada tataran tekstual yang kemudian

berimplikasi pada tataran kontekstual. Realisasi pelaksanaan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% tersebut mensyaratkan komitmen partai politik yang tinggi dan hal itu tercermin dalam daftar calon legislatif yang disusunnya. Dalam kenyataannya, komitmen tersebut masih diragukan banyak orang, dan jikapun ada komitmen, banyak partai politik yang masih mengalami kesulitan besar dalam memenuhi besaran kuota tersebut. Kondisi ini terkait dengan terbatasnya peran perempuan dalam dunia politik. Kentalnya budaya patriarkhi di masyarakat merupakan akar permasalahan tersebut. Budaya tersebut telah “mendiamkan” perempuan dan menjadikan perempuan bersikap submisif, yang pada gilirannya peran mereka dalam dunia politik sangat terbatas.

Pada dasarnya ideologi patriarkhi berlaku universal pada semua budaya, namun demikian sebenarnya terdapat variasi di dalamnya. Hal ini berarti antar masyarakat terdapat perbedaan “derajat kekentalan” ideologi patriarkhi tersebut. Variasi tersebut meliputi berbagai aspek seperti misalnya: jenis-jenis pekerjaan domestik tertentu yang “boleh” dilakukan laki-laki, jenis-jenis pekerjaan publik tertentu yang “boleh” dimasuki perempuan, relasi laki-laki – perempuan dalam pembuatan keputusan rumahtangga, nilai-nilai yang berkaitan dengan relasi jender dan sebagainya. Variasi demikian perlu dipahami mengingat perbedaan tersebut memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. Penelitian ini akan berusaha memahami variasi tersebut khususnya yang terjadi di Propinsi Lampung sebagai propinsi yang memiliki keragaman budaya.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas etnis yang masing-masing masih memiliki eksistensi nilai-nilai budaya cukup kuat sebagai referensi pola persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik secara individual maupun kelompok. Dalam konteks kehidupan politik, nilai-nilai budaya tersebut mempengaruhinya (mendorong/menghambat). Dalam penelitian ini akan diambil 2 komunitas etnik yakni Jawa dan Semendo. Komunitas etnis Jawa dalam hal ini merupakan wakil budaya campuran antara patrilineal dan matrilineal, dan komunitas Semendo merupakan wakil budaya matrilineal. Meskipun tidak selalu terdapat korelasi antara budaya/ideologi patriarkhi dengan sistem kekerabatan masyarakat, namun terdapat dugaan yang cukup kuat adanya keterkaitan antara sistem kekerabatan dengan “derajat

kekentalan” ideologi patriarkhi yang berkembang di suatu masyarakat. Komunitas etnis Jawa dan Semendo merupakan pendatang. Namun demikian etnis Jawa merupakan mayoritas di Lampung, dan kebanyakan dari mereka sudah merupakan keturunan yang sudah lahir di Lampung, dan kebanyakan mereka masih mengidentifikasi dirinya sebagai “orang Jawa”. Demikian pula halnya dengan komunitas etnis Semendo.

1.2. Perumusan Masalah

Secara garis besar rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejuahmana tingkat perbedaan karakteristik utama relasi politik laki-laki perempuan pada komunitas etnik Jawa dan Semendo? Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi:
 - a. Peran laki-laki perempuan dalam pembuatan keputusan penting/strategis dalam keluarga.
 - b. Peran laki-laki–perempuan dalam komunikasi politik dalam keluarga.
 - c. Peran laki-laki–perempuan dalam sosialisasi politik dalam keluarga.
 - d. Respon laki-laki–perempuan bila terjadi perbedaan pandangan/aspirasi politik antar keduanya.

2. Sejuahmana perbedaan tingkat interdependensi perempuan dalam menentukan pilihan-pilihan/keputusan-keputusan dalam bidang politik pada komunitas etnik Jawa dan Semendo?. Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi:
 - a. Kebebasan untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan dunia politik/publik.
 - b. Kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan politik pada berbagai even-event politik seperti pemilihan RT, kepala desa, pejabat publik lainnya, atau partai politik dalam pemilu.
 - c. Kebebasan untuk berperan dalam lembaga-lembaga politik lokal.
 - d. Kebebasan untuk berperan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan lokal.
 - e. Kebebasan untuk terjun/atau tidak terjun dalam dunia politik/publik.

3. Sejauhmana perbedaan rintangan sosio-budaya yang mencegah perempuan terlibat dalam dunia politik (publik) pada komunitas Etnik Jawa dan Semendo? Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi:
 - a. Nilai-nilai budaya lokal yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia politik/publik.
 - b. Derajat keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut.
 - c. Dukungan masyarakat (laki-laki-perempuan) terhadap upaya-upaya peningkatan peran politik perempuan.
 - d. Respon masyarakat (laki-laki-perempuan) terhadap kemunculan sosok perempuan dalam dunia politik tingkat nasional/lokal.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu sosial humaniora, khususnya bidang studi sosial politik dengan memberi informasi baru tentang kaitan antara etnisitas dan multikulturalisme dan hubungannya dengan peran politik perempuan di dua entitas budaya yang berbeda. Seperti diketahui masyarakat Semendo yang berbudaya tunggang memiliki sistem budaya matrilineal, sedangkan etnis Jawa berbudaya patrilineal. Penelitian ini akan memberi kontribusi baru tentang apakah aspek sosial budaya yang berbeda akan mengakibatkan peran politik yang berbeda atau tidak.

Selain itu, hasil riset juga diharapkan akan dapat memberi kontribusi positif bagi penulis untuk dapat menghasilkan artikel jurnal terakreditasi atau jurnal internasional. Kualitas riset yang lebih baik akan membuka kesempatan untuk itu. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi positif bagi penyusun kebijakan pembangunan sosial budaya dalam menuju demokrasi substansial dan budaya politik partisipan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Berbicara tentang perempuan, secara langsung telah menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai *the other sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan (Abdullah, 1997: 3). Perempuan adalah sebutan yang dipakai untuk jenis kelamin bukan lelaki. Meski perempuan dan lelaki berbeda secara biologis, akan tetapi konsep perempuan sesungguhnya tidak hanya berdasarkan jenis kelamin karena perempuan lebih dari sekedar tubuh yang bukan lelaki. Konsep perempuan lahir dari serangkaian interaksi dan nilai yang mempengaruhi definisi perempuan tentang dirinya maupun definisi masyarakat tentang perempuan.

Pada kenyataannya memang hampir semua kelompok masyarakat telah menggunakan jenis kelamin sebagai salah satu kriteria pengorganisasian kehidupan mereka. Dalam hal ini, selain merancang serangkaian peran lintas jenis kelamin (peran yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan), setiap kelompok masyarakat telah merancang pula bagi tiap-tiap jenis kelamin. Pola inilah yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk sosialisasi dalam masyarakat. Jenis peran tersebut baik peran yang bersifat feminin ataupun maskulin mempunyai keanekaragaman yang tak terbatas. Namun menurut kelaziman setiap kelompok masyarakat telah mempunyai sepasang peranan seks yang diakui dimana anggota masyarakat yang bersangkutan diharapkan mengikutinya dengan taat, sehingga pola tersebut bersifat tipikal. (Horton & Hunt, 1991).

Dasar pembagian peran jenis ini teracu pada konsep-konsep ideologis yang sesuai dengan sifat dan arti laki-laki dan perempuan, termasuk pengertian evaluatif tentang status relatif jenis kelamin tersebut (Sanderson, 1995:395). Dengan kata lain sebagai stereotip, konsepsi-konsepsi ideologis ini akan berperan sebagai standar untuk menentukan apakah perilaku individu sesuai atau tidak dengan jenis kelamin. Namun demikian, meski konsepsi ideologis berfungsi sebagai standar bukan berarti kemudian sebagai harga mati atau bersifat statis, akan tetapi berkemungkinan untuk berubah atau bersifat dinamis sesuai

dinamika sejarah masyarakat yang bersangkutan. Konsepsi-konsepsi ideologis tentang laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian sering dikenal dengan istilah gender.

2.1 Konsep Gender

Gender adalah perbedaan karakteristik, peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan/tuntutan zaman. Dengan kata lain, karena perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) maka dibedakan karakternya, perannya, statusnya, fungsinya.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. *Gender* sering dikatakan sebagai jenis kelamin sosial: antara feminis dan maskulin. Sedangkan jenis kelamin bermakna perbedaan secara seksual antara laki-laki dan perempuan karena tubuhnya. Jenis kelamin lebih bersifat kodrati. Menjadi laki-laki dan perempuan tidak karena manusia menginginkan dan membentuknya tetapi karena telah ditentukan Sang Penciptanya. Dengan demikian jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, laki-laki akan tetap laki-laki, demikian pula sebaliknya tidak dapat dipertukarkan dimana saja dan kapanpun. Hal ini berbeda dengan gender. Menjadi maskulin atau feminine adalah bentukan manusia. Perempuan menjadi berperan sebagai ibu dengan pekerjaan di dalam rumah tangga, karena masyarakat membentuk atau mengkonstruksikan seperti ini. Sebagai bukti bahwa hal ini membentuk atau konstruksi sosial dapat dilihat pada perbedaan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki di berbagai tempat.

Dimensi-dimensi ketimpangan atau ketidaksetaraan gender meliputi partisipasi, kontrol, manfaat, dan akses. Ketidaksetaraan dalam partisipasi berarti perempuan tidak dapat melakukan segala aktivitas kehidupan yang diinginkan tanpa kecuali, baik di dalam aktivitas produktif, reproduktif, maupun sosial. Ketidaksetaraan dalam hal akses berarti perempuan tidak memperoleh peluang terhadap berbagai aktifitas dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti tanah, alat-alat produksi, kredit, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ketidaksetaraan dalam akses juga berarti perempuan tidak dapat menikmati hak atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga dan

anggota masyarakat lainnya. Ketidaksetaraan dalam kontrol berarti perempuan tidak dapat menentukan secara mandiri tentang apa yang akan dia lakukan atau yang tidak dilakukan. Jika perempuan tidak dapat memutuskan secara mandiri apakah dia akan bekerja atau tidak, atau apakah hasil kerjanya akan dipergunakan, berarti perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Ketidaksetaraan dalam manfaat artinya perempuan tidak dapat menikmati manfaat dari aktivitas yang dilakukan atau aktivitas pembangunan pada umumnya.

Ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat menjadi sangat bermasalah ketika dikaitkan dengan pembagian kerja atas gender, yaitu pembagian kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang menganggap bahwa perempuan cocok untuk jenis pekerjaan tertentu, demikian juga laki-laki. Karena perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemeliharaan anak dianggap cocok untuk perempuan sementara pekerjaan mencari nafkah dianggap cocok untuk laki-laki meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah. Selain itu, pembagian kerja atas gender juga disebabkan karena adanya pelabelan gender (*gender stereotyping*) yaitu pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh perempuan itu cengeng, emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, sebaliknya laki-laki mandiri, tegas, kasar, agresif, dominan, kejam, dan sebagainya. Peran pencarian nafkah (produktif) cocok untuk laki-laki; peran reproduktif cocok untuk perempuan dan peran sosial dapat dilakukan laki-laki dan perempuan meskipun kecenderungannya laki-laki yang dominan karena aktivitas sosial dilakukan di luar rumah tangga.

Ketimpangan dalam pembagian kerja atas gender mengakibatkan munculnya banyak ketidakadilan gender yang terwujud dalam bentuk marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan, subordinasi perempuan atas laki-laki, stereotype gender, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda pada perempuan. Ketimpangan gender dalam pembagian kerja juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan yang pada umumnya dialami perempuan karena

anggapan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, dan sebagainya sehingga ada status dan peran tertentu yang ditutup atau dibatasi untuk perempuan, termasuk di dalamnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

2.2 . Faktor Penyebab Ketimpangan Gender

Banyak ahli yang sudah mencoba menjelaskan faktor penyebab munculnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek. Feminisme liberal menyatakan bahwa rendahnya posisi dan peran perempuan dibandingkan laki-laki disebabkan kurangnya kesempatan dan pendidikan terhadap perempuan. Asumsi yang dikembangkan adalah bahwa apabila perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing, maka mereka akan berhasil dalam menyamakan posisi dan perannya dengan laki-laki. Rosseau menyatakan bahwa tradisi feminisme liberal ini berkembang karena pemikiran-pemikiran yang berkembang menyatakan bahwa perempuan tidak lebih rasional dari laki-laki dan berdasarkan sifatnya maka pendidikannya dibatasi dan ditempatkan di ranah domestic. Sedangkan John Stuart Mill menyatakan bahwa perempuan menjadi penurut dan sudi dikendalikan orang lain karena mereka selalu diajarkan bahwa kewajiban dan hakekat mereka adalah untuk menyangkal diri sendiri dan untuk tidak memiliki hidup mereka sendiri. Menurut Wilson, teori ini sebetulnya merupakan bantahan dari teori *nature* yang menyatakan bahwa pembagian kerja seksual adalah sesuatu yang wajar, bersumber pada perbedaan struktur genetik dari laki-laki dan wanita. Senada dengan pernyataan Wilson, Freud dan Erich Fromm juga menyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual berkaitan dengan struktur anatominya (dalam Arif Budiman, 1981).

Atas dasar asumsi bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan terbatasnya akses atau peluang perempuan untuk bersaing dengan laki-laki, maka dikembangkan program *Women In Development* (WID) yaitu menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti ketrampilan, pendidikan, kebijakan yang dapat membuat perempuan mampu berpartisipasi. Pendekatan yang berasumsi bahwa keterbelakangan perempuan itu terletak pada perempuan itu sendiri, membuat mereka

tidak mempersoalkan ideologi patriarki yang menjadi penyebab diskriminasi sebagaimana dinyatakan feminis radikal.

Analisis feminis liberal mendapatkan banyak kritik dari sejumlah feminis lainnya. Bagi feminis radikal, penyebab penindasan terhadap perempuan berakar pada jenis kelamin laki-laki beserta ideologi patriarki. Jadi, dengan demikian 'kaum laki-laki' secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan (Jaggar, 1977). Patriarki merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi dianggap sebagai pokok masalah. Bagi mereka, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki. Semboyan mereka adalah *personal is political*.

Akan tetapi analisis feminis radikal ini dianggap ahistoris oleh feminis Marxist karena hubungan gender direduksi pada biologi. Bagi feminis Marxist, penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam relasi produksi. Engels, menyatakan bahwa sejarah jatuhnya status perempuan disebabkan karena perubahan organisasi kekayaan yaitu munculnya era hewan piaraan, petani menetap, yaitu suatu masa awal penciptaan surplus adalah dasar munculnya *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk *exchange*. Oleh karena itu, laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik sementara perempuan direduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Berbeda dengan analisis kaum feminis liberal yang lebih memfokuskan perempuan, analisis feminis Marxist lebih tertuju pada sistem kapitalisme. Penindasan terhadap perempuan dilanggengkan sistem kapitalisme, diantaranya melalui mekanisme 'eksploitasi pulang ke rumah', yakni suatu proses yg diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi oleh kapitalis selanjutnya pulang ke rumah dan terlibat dengan suatu hubungan kerja dengan isteri mereka. Dalam hal ini, perempuan diposisikan demi tujuan akumulasi kapital, dan bermanfaat untuk mereproduksi buruh murah. Oleh karena itu masuknya perempuan sebagai buruh akan diupah rendah lebih rendah dari laki-laki. Dalam struktur sosial ekonomi yang kapitalis, perempuan hanya sebagai tenaga kerja

cadangan yang murah. Kalaupun perempuan diposisikan di dalam rumah bukan karena biologis perempuan yang melahirkan anak tetapi karena secara struktur sosial ekonomi tidak menguntungkan. Posisi perempuan di dalam rumah dan laki-laki sebagai pencari nafkah dengan demikian merupakan pembagian kerja yang dibutuhkan masyarakat dan diciptakan untuk keuntungan seluruh masyarakat. Perempuan harus tinggal di rumah karena berguna untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sementara itu suami mengembangkan kariernya di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah tetapi tidak merupakan kariernya, karena apabila antara suami dan istri berkarier di luar rumah maka akan muncul persaingan yang akan merusak hubungan suami dan istri. (Talcot Parson dalam Arif Budiman, 1981). Bagi feminis Marxist, laki-laki bukan akar permasalahan tetapi kapitalisme itulah akar permasalahannya.

Feminis Marxist memperoleh kritik dari feminis Sosialis. Analisis mereka adalah sistesis antar metode historis dan ide *personal is political*. Penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi Marxist klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karenanya, analisis patriarki perlu dipadukan dengan analisis kelas. Dengan begitu, kritik terhadap eksploitasi kelas di suatu sistem kapitalisme pada saat yang sama harus disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan. Penindasan bagi mereka bisa menimbulkan kesadaran revolusi, tetapi bukan kesadaran *women as sex* model feminis radikal. Ketidakadilan oleh feminis Sosialis dipandang sebagai manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang diperangi adalah visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun di atas bias gender.

Kritik feminis Sosialis terhadap feminis liberal terletak pada anggapan bahwa ada korelasi positif antara partisipasi dalam produksi dan publik serta status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu tetapi tidak selalu menaikkan statusnya. Rendahnya partisipasi memang berkorelasi dengan rendahnya status

perempuan, tetapi keterlibatan perempuan juga mengakibatkan beban ganda perempuan karena mereka tetap ter subordinasi laki-laki. Akibatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi membawa perempuan pada antagonisme seksual daripada menaikkan statusnya.

Melengkapi pemikiran feminis liberal, pola pemikiran gerakan feminis radikal menyatakan bahwa system patriarkhilah penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan. Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi tubuh, heteroseksisme, dan kelasisme menurut feminisme radikal terjadi secara signifikan dengan penindasan patriarkhis. Shulamith Firestone dalam Jane dan Helen (1996) menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan didasarkan atas biologis perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi tergantung laki-laki untuk bertahan hidup. Untuk mempertahankan dominasi, laki-laki melakukan terorisme seksual (Susan Brownmiller dan Against Pur Will dalam Jane dan Helen, 1996). Selain itu dipergunakan kekerasan dan ancaman, meniadakan kontrol perempuan atas tubuh dan kehidupannya sendiri (Carole Sheffield dalam Jane dan Helen, 1996).

Feminis Kontemporer menyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual dipengaruhi faktor-faktor sosial ekonomi yang didasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat, serta faktor ideologi atau sistem patriachat. Dalam hal ideologi, Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan kekuasaan hegemoni, karena perempuan sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa perempuan tunduk padanya

Kamla Bhasin (1996) memberikan penjelasan bahwa dominasi laki-laki sebagai penguasa atas perempuan disebabkan karena budaya patriarkhi. Budaya ini mengatur pembagian kerja secara seksual yang menempatkan laki-laki di luar rumah sebagai pencari nafkah dan perempuan di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, dan melegitimasi laki-laki sebagai penguasa atas perempuan. Implementasi dari dominasi tersebut adalah pada kepemilikan alat produksi, akses terhadap informasi yang lebih banyak pada laki-laki semakin memperkuat posisi laki-laki sebagai penguasa. Pada prinsipnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya patriarkhi adalah nilai laki-laki lebih tinggi dari perempuan;

laki-laki sebagai pencari nafkah; dan superior dalam pengambilan keputusan. Budaya patriarkhi ini semakin kuat karena banyak kalangan yang mengaitkannya dengan agama, seperti laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pada akhirnya budaya patriarkhi menjadi ideology, karena pada akhirnya budaya patriarkhi menjadi system yang sangat sulit diubah, dan diterima begitu saja. Tjiptosubono (dalam Muthali'in, 2001) menggambarkan budaya patriarkhi dalam masyarakat Jawa dimana isteri ibarat jempol, artinya mengabdikan sepenuhnya pada suami, ibarat telunjuk yaitu menurut pada suami, ibarat jari manis yaitu bermanis muka pada suami, ibarat jejetik artinya teliti dan rajin. Dengan budaya patriarkhi maka perempuan menjadi tergantung pada suami atau laki-laki (Fakih, 1998), ijin dari suami sangat penting bagi perempuan yang berkarier atau mencari nafkah.

Ada dua hal yang penting dalam melihat budaya patriarkhi:

1. Differensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin

Banyak ahli antropologi, sosiologi dan ekonomi mengasumsikan bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah pada adanya peranan yang lebih besar atau menyeluruh dari pada wanita dalam pekerjaan rumah tangga (reproduksi) dan pekerjaan laki-laki dalam pekerjaan produktif. Walaupun dalam kenyataannya banyak juga perempuan yang terlibat dalam kegiatan pencarian nafkah, seperti dalam pertanian, kerajinan tangan, industri besar dan kecil (White, 1976; Hart, 1978; Cernea, 1978, Boserup, 1984). Pembagian peran ini menurut Miranti Hidayati (dalam Jurnal Perempuan NO 16), diciptakan oleh masyarakat patriarkhi dengan tujuan mempertahankan dominasi laki-laki. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa banyak perempuan yang setelah menikah tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya dengan alasan tugas utamanya sebagai seorang isteri adalah mengerjakan tugas-tugas domestic seperti mengatur rumah tangga, memasak meladeni suami, dan lainnya, Dan setelah keluarga itu mempunyai anak, maka tugasnya bertambah yaitu mengurus anak.

Anggapan bahwa anak laki-laki penerus garis keluarga, sangat tidak menguntungkan anak perempuan. Selain tidak diuntungkan karena hal tersebut, pola pengasuhan pada anak perempuan yang cenderung menciptakan sosok perempuan yang penyayang, patuh, tidak egois, lembut, menjadi tidak menguntungkan bagi perempuan yang

berusaha mengekspresikan keinginannya atau kebutuhannya. Sebagai contoh hasil penelitian Lita Purnama (Jurnal Perempuan No 17) menjelaskan bahwa adat Batak juga mengenal diferensiasi seksual yang ketat, sehingga walaupun pendidikan perempuan Batak sudah ada peningkatan, tetapi perempuan tetaplah berada dibelakang layar (tidak diperbolehkan ikut dalam perundingan apalagi berpendapat, dan tidak berhak memperoleh warisan). Tetapi di balik diskriminasi yang ada, perempuan Batak sangatlah tangguh, banyak janda yang berbekalkan pendidikan minimum bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.

2. Distribusi atau alokasi kekuasaan (*power*) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Blood dan Wolfe (1960) menyatakan bahwa aspek penting dalam struktur keluarga adalah posisi anggota keluarga karena distribusi dan alokasi kekuasaan, kemudian berikutnya adalah pembagian kerja dalam keluarga. Kekuasaan dinyatakan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga itu bisa sama nilainya (*equally*) antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) atau tidak sama nilainya. Hubungan kekuasaan itu dapat dilihat pada seberapa jauh masing-masing jenis kelamin menguasai sumber-sumber yang sangat berharga (tanah, tenaga kerja, bahan makanan, uang, informasi). Hubungan kekuasaan juga dapat dilihat dengan menganalisis ada tidaknya diferensiasi dalam perilaku dan ideology. Diferensiasi perilaku laki-laki dan perempuan adalah menunjuk pada peranan yang umumnya dilakukan masing-masing jenis kelamin. Diferensiasi dalam ideology menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan menganggap bahwa dirinya masing-masing secara mendasar berbeda; dalam hal ini masing-masing diharapkan memiliki nilai, norma, tujuan dan sebagainya. Pada akhirnya dua kutub perbedaan dalam distribusi kekuasaan dapat diperoleh, satu kutub pada hubungan kekuasaan yang seimbang (*balanced power*) dan tidak seimbang (*unbalanced power*).

Hubungan kekuasaan tersebut seringkali diterima apa adanya oleh masyarakat karena dianggap sebagai wewenang masing-masing (*authority*). Wewenang keluarga (*family authority*) pada umumnya diatur kebudayaan dalam masyarakatnya. Dalam budaya patriachat, suami dan isteri menganggap wajar bahwa suamilah berperan mengambil keputusan. Tetapi kenyataannya banyak variasi lain, sehingga menurut Blood dan Wolf ada faktor lain yang mendorong suami isteri mengambil keputusan. Rogers menyatakan bahwa variable itu adalah sumberdaya (*resources*) pribadi.

Pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang muncul sebagai alat untuk mempertahankan fungsi struktur sosial telah mengakibatkan terjadinya dominasi laki-laki atas perempuan yang di dalamnya terdapat hubungan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dimana perempuan ditempatkan di dalam rumah tangga pada akhirnya membuat dunia publik termasuk politik adalah dunia laki-laki. Pembagian kerja yang secara efektif disosialisasikan baik di dalam keluarga, sekolah ini merugikan perempuan karena menutup akses perempuan dalam berpolitik. Meskipun demikian, kekhawatiran juga muncul ketika peluang bagi perempuan untuk berpolitik mulai terbuka, karena ketika banyak perempuan yang tidak bisa memasuki dunia publik maka yang disalahkan adalah perempuan (perempuan tidak tertarik pada politik).

Ketidaktertarikan perempuan dalam politik selain disebabkan konstruksi budaya yang paternalistik, juga disebabkan karena konstruksi budaya tersebut seringkali memarjinalkan atau mengucilkan perempuan dari politik formal. Bagi perempuan, politik dianggap penuh persaingan, kejam, dan sedikit perempuan yang tahan untuk itu. Banyak perempuan yang merasa tidak mengetahui "aturan permainan" untuk dapat berhasil di politik dan lebih baik menjauh darinya. Partisipasi perempuan lemah, karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka minim ketrampilan dan seringkali lebih menjadi perimbangan gender daripada kekuatan politik yang sesungguhnya. Institusi dan proses-proses yang mendorong, memfasilitasi atau mendukung partisipasi politik perempuan sebagai sebuah bidang yang penting dalam kehidupan publik pun masih terbatas (IDEA, 1999). Hal ini disebabkan oleh budaya dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laki-

laki yang mempunyai karakter agresif dan kompetitif. Politik maskulin ini dapat dilihat pada dua aspek. dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laki-laki yang mempunyai karakter agresif dan kompetitif. Politik maskulin ini dapat dilihat pada dua aspek. Aspek pertama, politik yang terdapat pada masyarakat tradisional dilihat sebagai hubungan patron clien antara bapak dengan anak dan keluarga dimana bapak adalah pelindung dan pengambil keputusan. Oleh karenanya perempuan adalah yang dilindungi dan pelaksana atau bukan pengambil keputusan. Jadi hubungan patron clien menjadikan politik ditangan laki-laki (Barbara J. Nelson dan Najma Chowdhury (ed), dalam Gadis Arivia, 1999). Aspek maskulin yang kedua adalah rasa persaudaraan (*fraternalisme*) di dalam pembentukan institusi politik formal berdasarkan perikatan laki-laki (*male bonding*). Di dalam *fraternalisme*, arena politik memiliki member laki-laki, dengan laki-laki sebagai pembuat aturan main sedangkan perempuan adalah makhluk anti politis. Untuk Indonesia hal ini terlihat pada posisi dan peran perempuan di organisasi wanita seperti PKK, Dharma Wanita.

Di dalam situasi seperti tersebut di atas, maka masuknya perempuan dalam aktivitas politik hanya di dasarkan atas pertimbangan kerja sosial (*charity*) dan bukan *political will* (kehendak politik). Kehadiran perempuan di lembaga parlemen berkaitan dengan profesi dan karir suami (Azza Karam dalam Gadis Arivia). Bahkan Gadis Arivia menyatakan bahwa masuknya perempuan parlemen adalah "kecelakaan" atau kegiatan sampingan yang sejak semula tidak dianggap sebagai profesi yang akan dituju dan diperjuangkan. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau mengapa perempuan anggota parlemen di Indonesia tidak memandang posisi dan perannya sebagai pekerjaan politisi dengan dedikasi dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah ideologi gender. Ideologi gender yang termanivestasikan dalam sistem nilai, norma dan stereotype tentang perempuan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana orang memandang perempuan dan ruang geraknya. Ideologi gender terutama ideologi tentang seksualitasnya yaitu yang memandang posisi maupun hubungan perempuan dengan laki-laki atau dengan lingkungannya dalam struktur sosial yang ada, menurut Turner telah mengalami proses institusionalisasi dan internalisasi sehingga tersusunlah sistem

sosial budaya, yang menurut kaum fungsionalis akan bertahan lama apabila anggotanya menjalankan peran-peran sosial sesuai dengan harapan peranan (*role expectation*) yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut kaum strukturalis, hal ini disebabkan karena ada pemaksaan kelompok yang berkuasa atas dasar kepentingan sehingga ideologi gender dijadikan sebagai ideologi yang dominan. Levi Straus menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam posisi biner dimana perempuan dikatakan berada dalam posisi emosional, percaya tahayul, dan berperan dalam pengasuhan anak, sebaliknya laki-laki rasional, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan dalam pencarian nafkah. Sherry Ortner menyatakan bahwa dalam klasifikasi biner maka ciri utama adalah perempuan menempati posisi lebih rendah dari laki-laki. Pendekatan pascastrukturalis seperti Gramsci menyatakan bahwa walaupun memang ada nilai-nilai tertentu yang hegemonis karena pengalaman hidup atau subyektivitas yang berbeda-beda, ideologi gender selalu menjadi sumber pertentangan (dalam Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997)

Oleh karena masyarakat tidak statis, dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat tidak selalu berimbang atau dalam keadaan status quo, ideologi pun berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Formulasi ideologi seringkali mempunyai daya jangkau dan daya kendali yang tidak merata mengikuti diferensiasi sosial dalam masyarakat, dan perbedaan kepentingan dari institusi dalam negara. Walaupun negara dilihat sebagai kekuatan penting yang menentukan bentuk dan arah ideologi maupun discourse tentang aturan-aturan tertentu, negara bukan kekuatan yang monolit. Dalam beberapa institusi, tekanan bisa pada aspek yang lain, sesuai dengan tujuan yang berbeda-beda pula.

Oleh karena itu, formulasi ideologi harus sesuai dengan konteks sosialnya, dari kelompok atau individu yang mendukungnya dan dari struktur kekuasaan maupun mekanisme kekuasaan yang melestarikannya. Pendefinisian perempuan sebagai ibu dan pendidik bangsa, penggoda, sumberdaya manusia yang teliti dan ulet, seringkali digunakan secara bersama-sama atau secara bergantian dalam konteks yang berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda.

Ideologi gender dapat dilihat dalam bentuk nilai “pemingitan” (*seclusion*), pengucilan dari bidang-bidang tertentu (*exclusion*), nilai feminitas perempuan. Sebagai contoh, Rahayu Surtiati Hidayat (dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, Peny, 2000) menyatakan bahwa ada banyak pembatasan pada perempuan seperti dalam pendidikan, pencarian nafkah yang membuatnya terdiskriminasi dari laki-laki, yang diperkuat dengan ajaran agama yang bertentangan dengan aspirasi perempuan dalam pendidikan, pencarian nafkah, dan kemandirian. Terutama, batasan tentang kodrat merupakan kesulitan bagi perempuan untuk maksimal dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Selalu dikatakan bahwa “perempuan boleh berkarier sepanjang tidak menyalahi kodrat”. Ideologi gender ternyata tidak hanya menyulitkan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya, tetapi juga merugikan perempuan seperti terlihat pada terjadinya marginalisasi perempuan, domestikasi, dan pengiburumahtangaan (*housewifization*).

Kajian-kajian teoritik di atas dapat dijadikan landasan teoritis untuk melihat permasalahan yang terjadi pada perempuan terutama tentang hambatan sosio-kultural peran politik perempuan pada komunitas Etnik Jawa dan Etnik Semendo. Melalui perspektif gender dapat dipahami bahwa keberadaan masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan yang timpang atau tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang timpang memanifestasi dalam sikap dan perilaku individu yang bias gender dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih memprihatinkan lagi ketika sikap dan perilaku tersebut telah terlegitimasi oleh budaya masyarakat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara nilai-nilai sosial budaya dengan peran politik perempuan.
2. Dalam tataran praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan/rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah pemberdayaan politik perempuan. Bagi institusi-institusi yang mempunyai kepedulian terhadap peran politik perempuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan stimulan bagi upaya advokasi pemberdayaan politik perempuan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di dua komunitas desa dimana masing-masing etnis diwakili oleh 1 desa. Desa yang mewakili etnik Semendo berada di Kabupaten Tanggamus dan desa yang mewakili etnik Jawa berada di Kota Metro. Pemilihan desa sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan/kriteria sebagai berikut:

- a. Desa tersebut mempunyai struktur penduduk (berdasarkan etnisitas) relatif homogen dengan mayoritas penduduknya berasal dari satu etnik tertentu.
- b. Desa tersebut mempunyai struktur adat yang masih cukup kuat. Hal ini ditandai antara lain masih berfungsinya lembaga adat.
- c. Desa tersebut mempunyai tingkat keterbukaan dengan “dunia luar” yang masih rendah, yang ditandai antara lain dengan tingkat orbitas dan aksesibilitas terhadap informasi yang rendah.

4.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara bertahap. Dalam keseluruhan penelitian, kedua pendekatan tersebut mendapat porsi yang berbeda, dimana pendekatan kualitatif lebih dominan dan dapat dikatakan pendekatan kuantitatifnya merupakan penunjang pendekatan kualitatif. Model kombinasi dua pendekatan dengan salahsatu pendekatan yang dominan ini secara metodologis ini merujuk pada model yang disebut Creswell sebagai *dominant-less dominant design of mixed-methodology*. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif melalui survai digunakan untuk mendapatkan data agregat mengenai: pertama; karakter demografi perempuan seperti usia, agama, etnis, latar pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, asal daerah, dan lama tinggal di daerah penelitian. Kedua, karakter ekonomi rumahtangga. Ketiga, pengalaman dan jenis interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Keempat, karakter peran perempuan dalam politik atau lembaga-lembaga

politik/kemasyarakatan lokal di dalam komunitasnya. Sementara pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penajaman dan pendalaman informasi yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif. Selain itu dengan pendekatan kualitatif sikap dan pandangan subyektif narasumber dapat digali lebih maksimal. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur terhadap sejumlah informan.

Kombinasi pendekatan tadi kemudian dilengkapi dengan perspektif jender yang dalam proses penelitian ini tidak sekedar menempatkan perempuan sebagai obyek melainkan juga mengusahakan adanya pembangunan kesadaran jender yang berpihak pada perempuan. Dapat dikatakan penelitian ini dilandasi paham kesetaraan jender dan ditujukan untuk upaya transformasi sosial. Penelitian ini adalah penelitian yang berorientasi gender karena data dan informasi yang digali dalam penelitian dimaksudkan untuk mengungkapkan posisi dan peran perempuan dalam politik/lembaga politik/kemasyarakatan lokal. Posisi dan peran perempuan ini diungkapkan melalui pandangan laki-laki dan perempuan yang menjadi responden dan informan penelitian ini.

4.3 Informan Penelitian

Metode pengumpulan data melalui survei kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penarikan sampel bersifat purposif dan berjumlah 300 orang perempuan, yang terdiri dari 50 orang perempuan untuk masing-masing desa. Kriteria yang digunakan adalah perempuan yang telah menikah, tinggal di desa tersebut minimal 5 tahun, serta pernah ikut dalam pemilihan umum.

Sementara itu untuk pendekatan kualitatif digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan keseluruhan prosesnya direkam dengan *tape recorder*. Kategori informan yang digunakan adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah desa, tokoh pemuda/pemudi, aktivis pekerja sosial atau organisasi massa tertentu, aktivis organisasi/perkumpulan perempuan. Penentuan informan dilakukan dengan terlebih

dahulu melakukan wawancara pendahuluan terhadap sejumlah tokoh desa baik formal maupun informal.

4.4 Definisi Operasional

a. Peranserta politik perempuan:

Adalah keikutsertaan (partisipasi aktif) perempuan dalam lembaga-lembaga politik/kemasyarakatan lokal.

b. Perempuan:

Adalah perempuan yang berusia produktif (15 – 55 tahun) yang berstatus menikah/pernah menikah dan mempunyai pengalaman dalam pemilu (memberikan suara).

c. Keputusan penting dalam rumah tangga:

adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh laki-laki – perempuan (suami-istri) dalam hal masalah-masalah penting dalam keluarga seperti: pendidikan anak, pekerjaan anak, alternatif investasi, usaha yang akan dikembangkan dan sebagainya.

4.5 Metode Pengumpulan Data

- a. Pendekatan kuantitatif: kuesioner.
- b. Pendekatan kualitatif: wawancara mendalam (*indepth interview*).

4.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabel baik tunggal maupun silang. Sejauh mungkin akan digunakan beberapa teknik uji statistik yang relevan. Sementara data yang diperoleh dari *indepth interview* diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan prosedur pembuatan transkrip hasil wawancara, kategorisasi, reduksi dan *display* data.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

5.1.1 Desa Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus

Desa Gedung Agung secara administratif berada di wilayah Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Desa Gedung Agung berbatasan dengan Desa Merabung, Kecamatan Pugung; Desa Kemuning di sebelah Barat; Desa Kedatuan, Kecamatan Talang Padang di sebelah selatan dan Desa Karang Dowo, Kecamatan Talang Padang di sebelah timur. Desa Gedung Agung mempunyai wilayah seluas 297 hektar yang terdiri dari pemukiman (66 hektar), pesawahan (90 hektar), perkebunan (87 hektar), kuburan (25 hektar), pekarangan (20 hektar) dan fasilitas umum (6 hektar). Desa Gedung Agung merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.000 meter dari permukaan laut dan suhu rata-rata 25⁰ Celcius. Desa Gedung Agung hanya memiliki dua buah dusun yakni Dusun Gedung Agung dan Dusun Sinar Agung. Orbitasi desa cukup baik dengan jarak dari ibukota kecamatan hanya 4 kilometer, sementara jarak dari ibukota kabupaten sekitar 30 kilometer. Akses menuju desa dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dari ibukota kecamatan dan 1 jam dari ibukota kabupaten.

Desa Gedung Agung saat ini berpenduduk sebanyak 1.344 orang (194 KK) yang terdiri dari 722 orang laki-laki dan 642 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani (360 orang). Pekerjaan lain meliputi: wiraswasta (22 orang), PNS (12 orang), karyawan swasta (12 orang), lain-lain (3 orang). Petani yang berada di Desa Gedung Agung terdiri dari buruh tani atau tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 82 kepala keluarga dan petani kecil dengan penguasaan tanah di bawah 1 hektar sebanyak 273 kepala keluarga. Hanya terdapat 5 KK yang memiliki tanah lebih dari 1 hektar. Selain pertanian tanaman pangan (padi), komoditas pertanian lainnya adalah kopi dengan luas lahan sebesar 27 hektar, coklat (7 hektar), lada (5 hektar), karet (1 hektar) dan tanaman

hortikultura seluas 1 hektar. Pertanian yang berkembang di desa Gedung Agung secara umum merupakan pertanian kering.

Dari segi agama, seluruh penduduk (100%) Desa Gedung Agung beragama Islam. Dari segi etnisitas, Desa Gedung Agung didiami oleh dua kelompok etnis besar yakni Semendo (775 orang) dan Jawa (551). Sisanya sebanyak 8 orang beretnis Sunda. Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Gedung Agung relatif masih rendah. Di desa ini masih terdapat 175 orang penduduk usia 18-56 tahun yang masih buta aksara dan sebanyak 300 orang penduduk yang hanya berpendidikan dasar (SD). Kualitas SDM yang rendah tersebut beriringan dengan fasilitas pendidikan yang juga terbatas. Di Desa Gedung Agung, saat ini hanya terdapat 1 buah Taman Kanak-kanak (TK) dengan murid 30 anak dan 2 buah SD yang masing-masing memiliki murid sebanyak 250 orang.

Fasilitas umum lain yang terdapat di desa Gedung Agung terdiri dari: posyandu (2 unit), Puskesmas Pembantu (1 unit), lapangan voli (2 buah), Masjid (2 buah), Mushola (2 buah), gedung kantor pemerintahan (1 unit). Desa Gedung Agung memiliki saluran irigasi primer sepanjang 1.000 meter dan saluran sekunder sepanjang 100 meter. Fasilitas tersebut separohnya dalam kondisi rusak. Fasilitas transportasi yang terdapat di desa Gedung Agung terdiri dari jalan aspal sepanjang 0,5 kilometer dan jalan tanah/batu sepanjang 1,5 kilometer.

Fasilitas umum yang cukup menonjol yang terdapat di desa Gedung Agung adalah pusat rehabilitasi penderita kecanduan narkoba. Pusat rehabilitasi tersebut bernama "Padepokan Sangga Buana" yang telah berdiri sejak tahun 1995. Hingga saat ini, padepokan Sangga Buana menerima pecandu-pecandu narkoba dan mantan preman untuk disembuhkan/disadarkan. Melalui penerapan metode khusus, banyak pecandu narkoba yang telah sembuh dari penyakitnya.

5.1.2 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Metro. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Metro Pusat di sebelah utara, Kecamatan Metro Selatan di sebelah selatan, Kecamatan Metro Pusat dan Metro Barat di sebelah barat dan Kabupaten Lampung Timur di sebelah timur. Berada di dataran rendah dengan ketinggian antara 25-60 meter di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 26° hingga 28° Celcius dengan curah hujan rata-rata 2.000mm/th. Kecamatan Metro Timur merupakan kecamatan yang mempunyai orbitasi baik dan mudah diakses dari berbagai daerah sekitar. Jarak dengan ibukota kabupaten hanya sekitar 2 kilometer dan jarak dari ibukota provinsi sekitar 48 kilometer. Kecamatan ini termasuk tipe kecamatan perkotaan dimana terdapat sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman (\pm 562 ha atau 33,93%), meskipun demikian tanah persawahan masih cukup luas (+432 ha atau 26,13%).

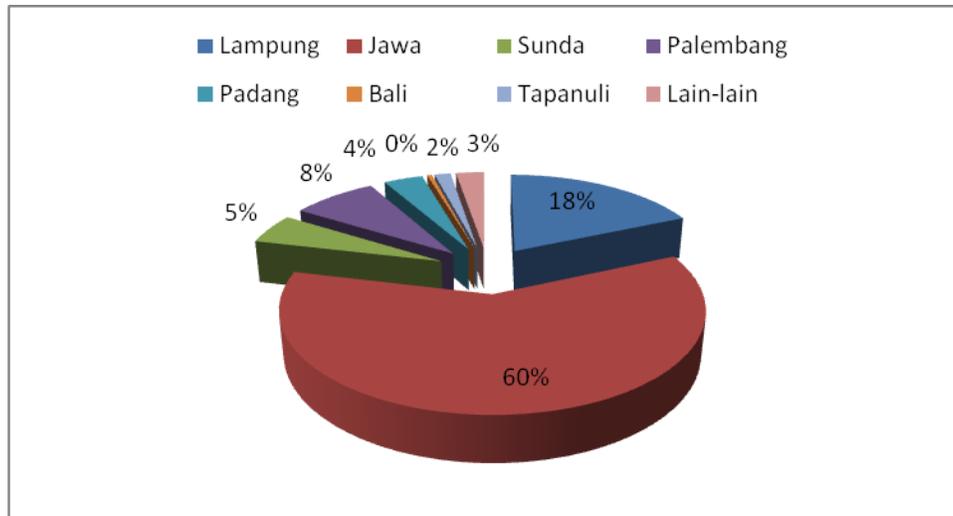
Jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 35.483 jiwa yang terdiri dari 17.601 laki-laki dan 17.882 perempuan. Dari segi agama, sebagian besar (89,5%) penduduk Mtero Timur beragama Islam. Agama lain yang dianut penduduk Kecamatan ini adalah Kristen (1.304 orang), Katholik (1.626 orang), Hindu (159 orang) dan Budha (631 orang). Dari segi pendidikan, Kecamatan Metro Timur memiliki kualitas SDM yang cukup memadai. Jumlah penduduk yang menikmati pendidikan tinggi mencapai 3.760 orang (10,59%) yang terdiri dari 1.846 orang lulusan akademi (D1-D3) dan 1.914 orang lulusan S1 hingga S3. Jumlah penduduk yang menikmati pendidikan menengah mencapai 15.797 orang yang terdiri dari 6.211 orang lulusan SLTP dan 9.586 orang lulusan SLTA. Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan khusus mencapai 5.123 orang yang terdiri dari 358 orang lulusan pondok pesantren, 717 orang lulusan madrasah, 98 orang lulusan pendidikan keagamaan, pendidikan luar biasa 3 orang, 103 lulusan kursus keterampilan, dan pendidikan lain-lain sebanyak 3.834 orang.

Struktur okupasi penduduk Kecamatan Metro Timur mencerminkan ciri perkotaan dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor formal dan jasa. Di kecamatan ini terdapat 4.558 orang yang bekerja sebagai pegawai (PNS-TNI/Polri-Karyawan), wiraswasta (2.089 orang), industri kecil /rumah tangga (1.141 orang), buruh (3.610 orang),

jasa (1.339 orang), sektor informal (6.064 orang). Pekerjaan sebagai petani hanya digeluti sebanyak 2.795 orang (7,87% dari jumlah penduduk). Dari segi etnisitas, penduduk kecamatan ini sebagian besar adalah orang Jawa sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 1

Komposisi Etnisitas Penduduk Kecamatan Metro Timur 2013



Sumber: Diolah dari Monografi Kecamatan Metro Timur, 2013.

Fasilitas keagamaan yang ada di Kecamatan Metro Timur terdiri dari masjid (27 unit), mushola (37 unit), gereja (2 unit), vihara (2 unit) dan kapel (2 unit). Fasilitas pendidikan meliputi Tk (8 unit), SD (13 unit), SLTP (6 unit), SLTA (8 unit) dan perguruan tinggi (2 unit). Sementara itu fasilitas pendidikan khusus terdiri dari 6 unit pondok pesantren, 1 unit madrasah, dan kursus-kursus 3 unit. Fasilitas olah raga yang tersedia adalah lapangan sepak bola (6 unit), lapangan basket (5 unit), lapangan volley ball (20 unit), lapangan bulu tangkis (22 unit), lapangan tenis meja (9 unit), lapangan tenis (4 unit) dan kolam renang untuk umum (3 unit). Fasilitas perdagangan yang tersedia meliputi pasar pagi (3 unit), toko (121 unit), warung (795 unit), kaki lima (25 unit) dan swalayan (2 unit). Jasa yang tersedia adalah bank (3 buah), travel (2 buah), notaries (2 orang), pengacara (6 orang) dan psikolog (1 orang). Fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi rumah sakit (1 unit), rumah bersalin (6 unit), posyandu (30 unit), pukeskesmas (4 unit), puskesmas pembantu (3 unit) dan praktek dokter swsta (11 unit).

Organisasi sosial yang terdapat di Kecamatan Metro Timur cukup beragam yakni antara lain: perkumpulan olahraga (73 buah), kesenian/kebudayaan (35 buah), dan organisasi lain seperti pramuka, karang taruna, PKK, Dasa Wisma dan organisasi yang mewadahi para difabel. Selain itu juga terdapat beberapa organisasi keagamaan seperti majelis taklim, remaja masjid, majelis gereja, majelis Budha, remaja gereja, remaja Budha dan lain-lain.

5.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 200 orang yang terdiri dari 100 orang dari kalangan etnik Jawa dan 100 orang berasal dari kalangan etnik Semendo. Responden yang berasal dari etnik Jawa bertempat tinggal di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sementara itu responden yang berasal dari kalangan etnik Semendo bertempat tinggal di desa Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Secara umum responden dipilih secara *purposive random sampling* dengan karakteristik awal yang ditentukan adalah: 1) perempuan yang memiliki latar belakang etnik Jawa atau Semendo, 2) pernah kawin, 3) dan tinggal di lokasi penelitian minimal 1 tahun. Berikut gambaran karakteristik sosio demografi responden.

Tabel 1. Karakteristik Sosio Demografi Responden

No	Karakteristik	Etnik Jawa (n=100)	Etnik Semendo (n=100)
1	Umur		
	a. Max	68	65
	b. Min	21	17
	c. Rata-rata	37	36
	d. Std. Deviasi	12,14	10,31

2. Jumlah anak kandung		
0	8	1
1	39	19
2	25	41
3	16	25
4	4	7
5	5	5
6	2	2
Lebih dari 6	1	0
3 Pekerjaan Pokok		
a. IRT	86	90
b. Pedagang	0	1
c. PNS	2	1
d. Buruh	1	0
e. Wiraswasta	8	7
f. Petani	1	0
g. Lain-lain	2	1

Sumber: Analisis Data Primer, 2013

Dari segi agama, seluruh responden etnik Semendo beragama Islam, sementara untuk etnik Jawa, terdapat 5 orang responden beragama Kristen dan 3 orang beragama Katholik. Tingkat pendidikan isteri pada etnik Jawa secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan etnik Semendo. Responden yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang, SLTP sebanyak 19 orang, SLTA sebanyak 57 orang, D3 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 8 orang dan yang tidak tamat SD sebanyak 2 orang. Sementara itu pada etnik Semendo, responden yang berpendidikan SD ada sebanyak 38 orang, SLTP sebanyak 30 orang, SLTA sebanyak 28 orang, S1 sebanyak 1 orang dan yang tidak tamat SD sebanyak 3 orang.

Tingkat pendapatan keluarga etnik Jawa secara umum juga lebih tinggi dibandingkan etnik Semendo. Rata-rata pendapatan keluarga pada etnik Jawa adalah sebesar Rp. 957.037/minggu. Pendapatan tertinggi =10.000.000 dan pendapatan terendah =Rp. 200.000/minggu dan standar deviasi= 1.559.384. Sementara itu tingkat pendapatan keluarga etnik Semendo rata-ratanya sebesar Rp. 340.100/minggu. Pendapatan tertinggi =Rp. 1.300.000, pendapatan terendah Rp. 70.000 dan standar deviasi sebesar = 234.938,2. Perbedaan tingkat pendapatan ini berkaitan dengan karakteristik pekerjaan yang lebih beragam pada etnik Jawa dibandingkan etnik Semendo.

5.3 POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DALAM KELUARGA

Penelitian tentang etnisitas sudah banyak dilakukan para ahli. Penelitian tersebut mengkaitkan variabel etnisitas dengan variabel lain seperti misalnya: kesehatan mental (Brown, 2008), kesehatan dan pemeliharaan kesehatan (Weber and Fore, 2007), ekspresi diri (Ahmadi dan Shahmohamadi 2011), semangat berwiraswasta (Ugwu and Ugwu, 2012), pola perkawinan (Philip and Fishman, 2006), pengadilan pidana (kriminal) (Crutchfield, et al., 2010); konflik antar etnik (Blagojevic, 2009; Anugwom, 2000), orientasi akademik (Hamm, 2000) kekerasan politik (Brown and Boswell, 1997), segregasi pekerjaan (Mintz and Krymkowski, 2010), pasar tenaga kerja (Spalter-Roth, 2007), kewarganegaraan dan ruang politik (Sassen, 2002), ketimpangan kekuasaan dan sumberdaya di masyarakat (Rex, 1981), jarak sosial (Ahmad and Yusof, 2012).

Dalam studi politik, etnisitas telah lama menjadi perhatian para ilmuwan dan peneliti politik dan pemerintahan. Sutherland (1983) misalnya mengkaitkan terbentuknya elit birokrasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan kultur Jawa yang memberikan nilai tinggi terhadap jabatan dalam pemerintahan; lebih tinggi misalnya dengan pencapaian harta milik. Karena itu jabatan ini diberi gelar tinggi dan dilambangkan dalam simbol-simbol kemegahan, termasuk bahkan menjadi pejabat kecil sekalipun tetap dihormati. Sementara itu Dalton (1985) menjelaskan bahwa etnisitas tetap menjadi variabel penting untuk menjelaskan bukan hanya pembelahan ideologis tetapi juga orientasi serta kecenderungan sikap dan perilaku politik masyarakat, termasuk di negara maju.

Dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, Zuhro (2009) mencatat bahwa etnisitas memiliki peran sangat penting dalam demokratisasi, khususnya dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dia mencatat dominanya peran etnis dalam demokrasi lokal pada masa reformasi di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain dalam pemilihan kepala daerah di Bojonegoro (Jawa), Solok (Sumatra), Bone (Sulawesi), dan Gianyar (Bali). Etnisitas telah menjadi klaim kekuasaan yang penting di keempat Kabupaten ini. Sementara itu Liddle (1996: 72) mengemukakan bahwa di luar faktor agama maka etnisitas, dalam hal ini ke-Jawa-an, memiliki pengaruh penting dalam kehidupan politik. Dia menyatakan:

“Java is also seen as constituting a threat, but from the inside, in the attitudes and values of the Javanese politicians-..... - who have dominated national politics since the early 1950s. During the New Order, both Islam and Javanism appear to have been growing in number of adherents and intensity of commitments, suggesting at least the possibility of greater polarisation and political tension. Non-Javanese ethnic groups and the Chinese minority also have distinctive cultural traditions, but these are much less important politically today than they were in the 1950s and early 1960s.”

Kalau Zuhro menyatakan bahwa etnisitas berperan penting dalam kehidupan politik di berbagai wilayah di Indonesia, Liddle berargumen bahwa etnis Jawa cenderung memiliki aspirasi dan peran politik yang bukan hanya penting, tetapi juga semakin dominan semenjak masa Orde Baru. Hal ini terlihat paling tidak dari sejarah dominasi peran elit Jawa dalam kehidupan politik di Indonesia.

Meningkatnya perhatian para ahli terhadap isu etnisitas seiring dengan munculnya fenomena “unik” yang terjadi di dunia yang semakin mengglobal saat ini yakni menguatnya identitas-identitas primordial terutama etnisitas. Fenomena ini ditandai antara lain dengan maraknya berbagai konflik berbasis etnik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia merupakan kulminasi konflik etnis dan menguatnya sentimen primordial atas dasar etnis yang berakhir pada pevahnya negara. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap etnisitas berkaitan dengan kecenderungan masyarakat yang semakin pluralistik. Menurut Cooney (2009), meningkatnya diversitas penduduk di banyak negara disebabkan arus migrasi global selama 40 tahun terakhir. Sementara itu, Grand et al. sebagaimana dikutip Durham (2005: 694) menyatakan bahwa etnisitas merupakan kategori stratifikasi sosial yang semakin relevan pada masyarakat multietnik kontemporer. Konsekuensinya, etnisitas menjadi bagian sosiologi kontemporer di satu sisi dan di sisi lain menjadi isu yang berkaitan dengan diskriminasi etnik, rasisme, identitas etnik, hak minoritas etnik, migrasi transnasional dan diaspora lain. Meski demikian, kelas masih menjadi variabel krusial untuk memahami kesenjangan dalam masyarakat.

Dalam perkembangan menuju masyarakat multikultural, etnisitas cenderung menjadi faktor independen dalam menjelaskan perbedaan hak-hak warga negara. Ruud Koopman dan Paul Staham, memperkenalkan model institusional dengan dua dimensi yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antar etnis. Pertama, dimensi vertikal, yakni basis warga negara formal dan legal yang dibedakan antara ius sanguinis dan ius soli. Kedua, dimensi horizontal (politik-kultural dan horizontal) yang membedakan antara monisme kultural (asimilasi) dan pluralisme kultural (Siim, 2006:67).

Dalam konteks Indonesia, isu etnisitas juga semakin krusial terutama sejak era reformasi. Pudjiastuti sebagaimana dikutip Hadiwinata (2009:285), menyatakan bahwa etnisitas menjadi isu yang semakin sensitif di Indonesia sejak dekade 1990-an. Terdapat indikasi konsekuensi negatif kebijakan transmigrasi yang dilancarkan pemerintah sejak dekade 1960-an. Selama tahun 1995-1996, misalnya terjadi konflik berdarah di Kalimantan Barat antara orang Dayak dan para pendatang etnik Madura yang

mengakibatkan ratusan orang meninggal dan terluka serta ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya.

Dalam kaitannya dengan aspek gender, etnisitas merupakan salah satu struktur selain umur dan status sosial yang mempengaruhi perilaku berbasis gender (Epstein, 2006). Identitas gender saling berkelindan dengan identitas sosial lain seperti ras, etnisitas, kelas dan umur dalam suatu kompleksitas (Cuff et al., 2006) dan hal tersebut bahkan mempengaruhi struktur dan strategi gerakan gender (Acker, 2006). Secara teoritik dengan demikian etnisitas mempunyai keterkaitan dengan pola pengelolaan keluarga termasuk dalam hal pola pengambilan keputusan strategis.

Pola pengambilan keputusan strategis dalam keluarga merupakan parameter penting dalam melihat kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Pola pengambilan keputusan strategis keluarga dalam konteks budaya patriarkhis sangat diwarnai dominasi laki-laki. Hampir semua keputusan penting diambil oleh laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga. Perempuan atau isteri pada umumnya hanya mengikuti keputusan-keputusan yang diambil oleh suaminya. Dalam beberapa kasus, keputusan strategis melibatkan perempuan dengan cara memusyawarahkan secara bersama antara suami dan isteri, akan tetapi keputusan terakhir pada umumnya tetap di tangan suami. Meski demikian, berbeda dengan pandangan esensialis yang cenderung melihat patriarkhi sebagai kecenderungan seragam seperti pernyataan di awal paragraf ini, riset ini tidak melihat patriarkhi sebagai kecenderungan yang seragam karena faktor etnis, faktor tempat tinggal, faktor sosial berpotensi menyebabkan tingkat patriarkhi yang berbeda pada masyarakat yang berbeda. Secara singkat etnisitas dan faktor sosial lain berperan penting dalam membentuk peran politik perempuan dari masyarakat-masyarakat yang berbeda. Argumen ini didasarkan pada teori yang cukup baru dalam studi feminisme (Moya Lloyd, 2005: 9) yang menyatakan bahwa perempuan bukanlah subyek tunggal. Dia berargumen bahwa identitas (penulis: dalam hal ini etnisitas) tidak menjamin adanya kecenderungan politik yang tunggal. Perempuan dalam kehidupan politik adalah “*subject in process*” (subyek dalam proses) yang memiliki 5 (lima) karakter yaitu *mobile* (selalu berubah), *lack* (mempunyai kelemahan), *deferred* (menginginkan memiliki sifat kelebihan laki-laki), *constituted* (mencerminkan sifat-sifat femininitas), dan *performative* (dalam proses

membentuk sifat subyek yang baru). Singkatnya, di luar politik identitas, sebenarnya juga ada budaya politik sub-kultur di kalangan perempuan dengan identitas budaya yang sama.

Dalam penelitian ini, pola pengambilan keputusan diukur dari lima indikator yakni: 1) pola pengelolaan keuangan keluarga, 2) pengawasan (kontrol) suami terhadap penggunaan uang keluarga, 3) keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, kegiatan, pilihan baju anak, 4) keputusan yang berkaitan dengan belanja untuk kebutuhan sehari-hari, pilihan masakan dan sebagainya, 5) keputusan yang berkaitan dengan pembelian barang-barang yang mahal seperti kendaraan, tanah dan sebagainya. Berbeda dengan pandangan kelompok feminis liberal tentang yang mendefinisikan politik sebagai aktivitas mempengaruhi kebijakan dalam lingkup masyarakat dan negara, feminisme radikal melihat bahwa esensi politik bukanlah aktivitas, tetapi “*power-structured relationship*” (Kate Millet dalam Vicky Randal, 1987: 12) yang bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkup domestik, bahkan menyangkut masalah personal, seperti mengenakan baju atau kebiasaan makan untuk menunjukkan identitas diri. Sekali lagi, pembuatan keputusan dalam keluarga adalah ekspresi struktur hubungan kekuasaan yang merupakan esensi studi politik.

Dalam hal pola pengelolaan keuangan keluarga, secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara etnik Jawa dengan Semendo. Pola pengelolaan keuangan pada umumnya disatukan antara pendapatan suami dan isteri dengan istri sebagai pengelolanya. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan realitas bahwa suami pendapatan utama keluarga bersumber dari pekerjaan yang dilakukan suami (*bread winner*). Di kalangan etnis Jawa, terdapat 5 orang responden yang pengelolaan keuangan keluarganya dipegang oleh suami, dan 10 orang dikelola oleh keduanya antara suami dan istri. Sisanya, sebanyak 85 orang dikelola oleh istri. Sementara di kalangan etnik Semendo, hanya terdapat 4 (empat) responden yang pengelolaan keuangannya dipegang oleh suami, 3 orang dikelola masing – masing oleh suami-isteri dan 2 orang yang dikelola oleh keduanya secara bersama-sama. Sisanya sebanyak 91 orang, dikelola oleh istri.

Dalam hal pengawasan suami terhadap keuangan keluarga, secara umum nampak ada perbedaan di antara kedua etnik. Di kalangan etnik Jawa, sebanyak 9 responden yang menyatakan selalu ada pengawasan suami dalam pengelolaan keuangan keluarga, 3 orang

responden yang menyatakan “sering” dan sisanya sebanyak 88 orang menyatakan tidak pernah diawasi suami dalam hal penggunaan uang untuk kebutuhan keluarga. Di kalangan etnik Semendo, terdapat 3 orang responden yang mengaku selalu diawasi oleh suami dalam penggunaan keuangan keluarganya, 16 orang menyatakan sering dan 35 orang menyatakan jarang. Sisanya sebanyak 46 orang responden menyatakan tidak pernah diawasi suami. Pengawasan suami terhadap keuangan keluarga secara umum lebih intensif pada etnik Semendo daripada Jawa. Hasil perhitungan nilai Z menunjukkan angka 2,06 (>1,64) yang berarti ada perbedaan signifikan dalam hal pengawasan suami terhadap keuangan isteri antara etnik Semendo dengan etnik Jawa. Secara umum, pengawasan keuangan lebih intensif pada etnik Semendo dibandingkan etnik Jawa.

Perhitungan Nilai Z:

$$Z = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{3,51 - 3,25}{\sqrt{0,95^2/100 + 0,83^2/100}}$$

$$Z = \frac{0,26}{\sqrt{0,009025 + 0,006889}}$$

$$Z = \frac{0,26}{0,1262} = 2,06.$$

Nilai Z sebesar 2,06 lebih besar dibandingkan $\alpha = 0,05$ (1,64) sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengawasan suami terhadap penggunaan uang keluarganya antara etnik Jawa dengan etnik Semendo. Hal ini menjadi temuan menarik, karena justru pengawasan suami terhadap keuangan keluarga lebih intensif terjadi pada etnik Semendo yang notabene adalah matrilineal. Hal ini menggambarkan posisi

perempuan (isteri) dalam keluarga relatif lebih lemah di banding etnik Jawa yang bilineal (menganut dua garis keturunan). Namun demikian masih perlu dipastikan apakah rendahnya posisi perempuan tersebut berkaitan dengan kultur ataukah terdapat faktor lain seperti misalnya tingkat pendidikan.

Hasil wawancara mendalam dengan narasumber dari etnis Semendo (26 September 2013) menunjukkan bukti menarik mengenai aspek pengelolaan keuangan ini. Narasumber dari etnis Semendo (baik laki-laki maupun perempuan) menyatakan bahwa dalam tradisi Semendo, khususnya Semendo Lembak (atau sering disebut Semendo Darat), adat tunggu tubang menggariskan bahwa laki-laki dan khususnya suami adalah “tamu” di rumah. Sebagai tamu maka hak suami berkenaan dengan pengelolaan keuangan keluarga sebatas menyangkut harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu pengelolaan harta warisan atau harta pusaka dari orang tua kepada anak perempuan sepenuhnya adalah hak perempuan itu sendiri; suami tidak memiliki hak apapun untuk mempertanyakan atau mengganggu gugat penggunaan harta pusaka itu. Dalam hal ini, jawaban responden dalam survey mengenai besarnya peran suami dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pengawasan penggunaan keuangan oleh istri mesti diterjemahkan secara hati-hati, yaitu sebatas menyangkut keuangan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, atau harta “gono-gini” dan tidak ada kaitannya dengan keuangan atau harta terkait pusaka atau warisan orang tua. Hal ini juga dapat menjadi faktor penjelas mengapa data kuantitatif menunjukkan bahwa suami dari etnis Semendo “lebih tertarik” untuk mengawasi harta milik berdua karena kenyataannya suami tidak memiliki hak apapun terhadap harta milik istri yang bersumber dari warisan orang tua. Ketiadaan hak di satu aspek membuat suami “memiliki alasan” untuk lebih tertarik mengawasi penggunaan keuangan milik bersama.

Sementara itu hasil wawancara mendalam dengan narasumber dari etnis Jawa (2 November 2013) menunjukkan bahwa salah satu prinsip budaya Jawa yang penting menyatakan istri yang baik adalah istri yang “gemi setiti” (hemat dan hati-hati dalam melakukan pengeluaran keuangan), yang dapat mencukupkan apapun yang diberikan suami, bahkan harus tetap bisa menyisihkan tabungan meskipun penghasilan suami sangat kecil. Adat “kacar-kucur” dalam upacara perkawinan Jawa menunjukkan istri tidak boleh

sedikitpun menumpahkan bulir-bulir beras yang dinafkahkan oleh suami, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada sedikitpun unsur pemborosan oleh istri dalam mengelola penghasilan yang diberikan oleh suami. Prinsip ini mungkin dapat menjelaskan mengapa lebih sedikit suami dari etnis Jawa yang secara ketat mengawasi penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh istri karena secara adat dia percaya bahwa istrinya akan bertindak bijaksana dan hemat mengelola keuangan sesuai ajaran adat Jawa.

Perbedaan peran dan hubungan suami istri dalam pola pengelolaan keuangan dalam keluarga etnis Semendo dan Jawa (paling tidak dilihat dari hasil survey dan wawancara mendalam) menggambarkan kondisi relasi kuasa yang menarik yang menunjukkan bahwa perempuan sebagai “agensi kekuasaan” dalam “struktur keluarga” (Moya Lloyd, 2005: 91-110; David Marsh dan Gery Stoker, 1995; Susan M. Deeds, 2008) menunjukkan kompleksitas budaya dimana identitas dan peran gender berubah dan berkembang dalam bentuk saling pengaruh dengan etnisitas. Singkatnya perempuan Semendo sebagai “agensi kekuasaan” dalam pengelolaan keuangan keluarga mempunyai posisi dan peran yang berbeda dengan perempuan Jawa adalah karena identitas ke-Semendoan-nya, begitu juga sebaliknya. Meski demikian, perlu dicatat dengan lebih hati-hati bahwa perempuan (dalam studi ini baik dalam kelompok Semendo maupun Jawa) adalah *multiple subject* (Moya Lloyd, 2005: 15) atau subyek yang “*is produced across, and positioned within several axes. The subject is, thus, in a continual state of flux. Such selves are never fixed; rather, their identity is permanently open to rearticulation*”. Karena itu gambaran peran tersebut adalah identitas sebagai produk etnisitas perempuan dan dalam proses berubah terus sesuai dengan interaksi dan perkembangan yang terjadi dalam komunitas etnis tersebut.

Aspek peran politik dalam pengambilan keputusan dalam keluarga yang kedua dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan tentang pendidikan anak dan pilihan baju anak. Data menunjukkan bahwa 95 responden Semendo dan 52 responden Jawa menyatakan pengambilan keputusan dilakukan bersama antara suami dan istri. Sementara itu, pengambil keputusan yang biasanya dilakukan isteri adalah sebanyak 44 orang responden Jawa dan 5 orang responden Semendo. Pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan suami adalah sebanyak 4 orang pada etnik Jawa dan 0 (tidak ada) pada etnik

Semendo. Posisi isteri di kalangan etnik Jawa nampak lebih memiliki *power* dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, kegiatan dan pilihan baju anak. Sebaliknya, pada etnik Semendo, posisi istri dalam pengambilan keputusan tersebut kurang memiliki *power*, sekalipun etnik Semendo merupakan etnik dengan pola matrilineal. Hal ini sekali lagi memperkuat argumen yang telah dikemukakan dalam penjelasan tentang pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan dimana laki-laki etnis Semendo lebih banyak terlibat atau mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh istri. Keputusan tentang pendidikan adalah aspek penting yang berhubungan dengan harta milik bersama dalam keluarga karena pendidikan anak harus didanai dari penghasilan selama pernikahan dan bukan dari harta waris milik istri. Karena itu sudah pasti laki-laki etnis Semendo sangat berkepentingan dengan penggunaan penghasilan untuk pendidikan anak. Salah satu responden dari etnis Semendo menyatakan:

“Untuk hal-hal penting seperti pendidikan anak, perkawinan anak kami harus selalu

bicarakan bersama, termasuk penggunaan harta dan penghasilan yang kami peroleh dalam perkawinan. Kalau untuk harta dari warisan orang tua saya, ya nggak, itu sepenuhnya hak saya, mau saya apakan terserah saya” (Sumber: wawancara September 2013).

Sebaliknya perempuan etnis Jawa yang memiliki peran lebih besar dalam membuat keputusan tentang pengelolaan keuangan juga cenderung memiliki peran yang lebih dominan (dibanding perempuan etnis semendo) dalam pembuatan keputusan tentang pendidikan anak. Jelas bahwa ada kesejajaran dalam hal peran dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan tentang pendidikan anak; besarnya peran dalam keputusan pengelolaan keuangan juga diikuti besarnya peran dalam pembuatan keputusan tentang pendidikan anak.

Pengambilan keputusan dalam keluarga yang berkaitan dengan belanja kebutuhan sehari-hari dan pilihan masakan secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan diantara kedua etnik. Sebanyak 85 responden dari etnik Jawa menyatakan bahwa pengambil keputusan dalam hal tersebut biasanya adalah istri. Jumlah tersebut tidak terlalu berbeda

dengan etnik Semendo yakni 82 orang. Pada etnik Semendo terdapat 17 responden yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil biasanya oleh keduanya (dimusyawarahkan bersama antara suami-isteri) dan 1 responden yang menyatakan biasanya dilakukan oleh suami. Pada etnik Jawa terdapat 15 orang responden yang menyatakan pengambil keputusan biasanya dilakukan berdua (musyawarah) dan tidak ada suami yang mengambil keputusan dalam soal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dibanding pengelolaan keuangan dan pendidikan anak, maka belanja kebutuhan sehari-hari adalah urusan yang kurang penting dan tidak membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, cukup oleh istri saja.

Pengambilan keputusan dalam keluarga yang berkaitan dengan pembelian barang-barang mahal secara umum dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri. Terdapat perbedaan diantara kedua etnik yakni 93 pada etnik Semendo dan 63 pada etnik Jawa. Pengambilan keputusan yang dilakukan suami nampak lebih dominan pada etnik Jawa yakni sebanyak 29 orang berbanding 1 orang pada etnik Semendo. Peran isteri dalam pengambilan keputusan tersebut tidak terdapat perbedaan yang berarti yakni 6 orang pada etnik Semendo dan 8 orang pada etnik Jawa. Secara umum, berdasarkan ketiga indikator pengambilan keputusan (pendidikan anak, belanja kebutuhan sehari-hari dan pembelian barang mahal), terdapat perbedaan dalam pola pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan pada etnik Semendo relatif lebih melibatkan suami-isteri untuk mengambil keputusan terutama untuk keputusan berkaitan dengan pendidikan anak dan pembelian barang mahal. Sementara itu untuk keputusan dalam belanja kebutuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh isteri pada kedua kelompok etnik.

Perbedaan posisi dan peran perempuan Semendo dan Jawa dalam pembuatan keputusan tentang pembelian kebutuhan sehari-hari dan pembelian barang-barang mahal menunjukkan bahwa etnisitas tidak bisa dipahami dengan hanya melihat satu etnis saja, tetapi mesti membandingkannya dengan etnis lain dan melihat dimensi waktu yang menjadi faktor penting dalam etnisitas; menurut E.P. thomas etnisitas “bukanlah sesuatu”, tetapi “menjadi sesuatu” (Bogumil Jewsiewicki, 2005: 326).

Tabel 2

Perbandingan Pola Pengambilan Keputusan Keluarga pada Etnik Jawa dengan Semendo

Jenis Keputusan Keluarga	Etnik	Pola Pengambilan Keputusan		
		Biasanya Suami	Biasanya Istri	Keduanya
pendidikan, kegiatan dan pilihan baju anak	Jawa	4	44	52
	Semendo	0	5	95
belanja kebutuhan sehari-hari dan pilihan masakan	Jawa	0	85	15
	Semendo	1	82	17
pembelian barang-barang mahal	Jawa	29	8	63
	Semendo	1	6	93

Sumber: Analisis Data Primer, 2013.

Dalam konteks studi, terlihat jelas mengenai bagaimana latar belakang wilayah tempat tinggal etnis serta latar belakang keluarga narasumber berpengaruh besar terhadap perbedaan peran perempuan dalam pembuatan keputusan keluarga di kedua etnis ini. Etnis Semendo tinggal di wilayah yang cukup jauh dari pusat kota, orbitasinya sekitar 35 km dari ibukota Kabupaten Tanggamus. Mereka tinggal di wilayah yang kehidupannya mayoritas masih bergantung pada pertanian, khususnya kebun kopi. Sementara itu perempuan etnis Jawa dalam penelitian ini tinggal di wilayah yang merupakan bagian dari Kota Metro dan para narasumber mempunyai pekerjaan yang sangat variatif di luar pertanian, yaitu berdagang, pegawai negeri sipil, mengelola sanggar seni, mengelola butik, dan mengelola salon. Narasumber etnis Semendo tidak memiliki latar belakang keluarga yang aktif berpolitik atau bahkan mengelola ormas; sementara narasumber etnis Jawa

memiliki latar belakang keluarga yang aktif secara sosial maupun politik, antara lain mengelola pondok, menjadi kepala sekolah, menjadi anggota DPRD Kota Metro. Satu narasumber bahkan saat ini (saat riset berjalan) secara formal tercatat menjadi calon anggota DPRD Kota Metro meski sudah menyatakan mengundurkan diri (tidak dapat diproses pengunduran dirinya karena pengunduran diri dilakukan setelah Daftar Calon Tetap/DCT anggota DPRD Kota Metro sudah ditetapkan oleh KPU Kota Metro). Dilihat secara fisik, hampir tidak terlihat perbedaan mencolok penampilan para narasumber dari etnis Semendo maupun Jawa (ada yang berpenampilan “modern” maupun “tradisional”), tetapi jika dilihat latar belakang keluarga dan peran mereka di masyarakat, terlihat perbedaan jelas antara kedua kelompok. (Sumber: hasil wawancara dan pengamatan bulan September 2013).

Perbedaan posisi dan peran perempuan dari kedua etnis ini sebenarnya tidak terlepas dari perspektif masing-masing dalam melihat makna peran itu sendiri. Seorang narasumber perempuan dari etnis Jawa menyatakan:

“Kalau masyarakat Jawa itu guyub sekali, maka segalanya lebih mudah dilakukan, termasuk mengelola berbagai organisasi seperti yang saya lakukan. Saya tinggal kasih tau kita mau ini ini ini, maka ibu-ibu termasuk kadang-kadang para bapak, datang dengan membawa berbagai makanan. Kerukunan ini membuat saya senang berorganisasi dan mengelola organisasi. Kadang-kadang saya berpikir, kok suku lain kayaknya jalan sendiri-sendiri ya, nggak ada keguyuban gitu. Tapi ini mungkin hanya perasaan saya saja ya, mungkin menurut pendapat mereka ya mereka juga guyub, cuma saya nggak tau. Mungkin begitu” (Sumber: wawancara September 2013).

Perbedaan peran dalam pengambilan keputusan dalam keluarga antara perempuan dari kedua kelompok etnis ini menunjukkan bahwa etnisitas memiliki peran penting dalam membentuk peran politik perempuan. Tetapi faktor lokasi tempat tinggal juga tidak kalah pentingnya, termasuk faktor sosial perempuan dari kedua kelompok etnis yang menjadi narasumber penelitian dimana perempuan dari etnis Semendo hanya lulus SD dan SMP sementara narasumber etnis Jawa lulus SMA dan sedang menempuh jenjang studi Strata satu serta lulus perguruan tinggi (sumber: wawancara September 2013).

Etnisitas berkelindan dengan faktor lain, yaitu lokasi tempat tinggal dan pendidikan sebagai aspek-aspek penting yang menjadi faktor pembentuk peran. Hal

seperti ini menjadi temuan penelitian J.H. Black dan N.E. MGlen serta J.Lewis seperti dikemukakan oleh Randal sebagai berikut (Vicky Randal, 1987: 85): “*Similarly, in both Canada and Argentina, studies have shown that it is the women most sheltered by tradition-older, less educated, religious, rural-who show the greatest divergence in social and especially political attitudes from their menfolk*”.

Dilihat dari latar belakang para narasumber, maka jelas bahwa narasumber dari etnis Semendo tidak berasal dari keluarga yang aktif secara sosial maupun politik, sedangkan narasumber dari etnis Jawa berasal dari keluarga yang aktif dalam kehidupan sosial politik (sumber: hasil wawancara september 2013). Jelas bahwa mereka mendapat sosialisasi politik dalam keluarga yang sangat berbeda. Hal ini juga menjelaskan mengapa peran politik perempuan dari kedua etnis cenderung berbeda. Riset-riset terdahulu menemukan bahwa *childhood socialization* atau sosialisasi pada masa kecil adalah faktor penting yang mempengaruhi sikap dan peran politik, khususnya perempuan (M. Duverger, 1955; C.B. Flora dan N.B. Lyn, 1974; F. Greenstein, 1965). Hal ini juga menjelaskan mengapa narasumber dari etnis Semendo menyatakan:

“Menurut saya tidak ada perempuan di sekitar sini (catatan: Kecamatan Pulau Pangung) yang aktif dalam kehidupan politik, khususnya menjadi anggota DPR (catatan: DPRD Kabupaten Tanggamus). Mungkin ada ya dari daerah lain, tapi kalau perempuan di sekitar sini, khususnya dari orang Semendo di sini, nggak ada (catatan: yang aktif dalam kehidupan politik di tanggamus). Saya sendiri juga nggak ingin ikut (dalam kehidupan politik), sudah tua. Dulu pernah aktif di kelompok Muslimah NU dan kader PKK, tapi sudah lama nggak ikut. Orang tua saya juga petani saja, memang dulu cukup kaya tanah, makanya saya dapat warisan sesuai adat. Tetapi orang tua saya ya tani saja ” (sumber: wawancara september 2013)

Kebalikan dari pernyataan narasumber etnis Semendo, seorang narasumber dari etnis Jawa mengatakan:

“Dari waktu kuliah saya sudah aktif berorganisasi di HMI STAIN. Kedua orang tua saya kepala SD di Lampung Timur, ayah pengurus Muhammadiyah Lampung Timur. Kakek punya pesantren, juga di Lampung Timur. Makanya saya juga ingin terus berorganisasi karena menurut saya berorganisasi mengurus masalah orang banyak itu adalah amal yang baik, seperti ajaran orang tua dan kakek saya. Suami juga sangat aktif berorganisasi dari mahasiswa dulu, bahkan pernah jadi ketua HMI Cabang Metro.”

Ilustrasi dari cerita dua narasumber tersebut menunjukkan bahwa mereka mendapat pengalaman sosialisasi masa kecil yang sangat berbeda; karena itu sikap dan peran politik

mereka berbeda. Dengan demikian, riset dengan latar belakang lokasi yang berbeda (etnis Semendo wilayah urban dan etnis Jawa wilayah pedesaan) mungkin akan menghasilkan gambaran yang berbeda.

5.4 KOMUNIKASI POLITIK

Etnisitas mempunyai kaitan erat dengan struktur politik suatu negara. Menurut Lane and Ersson (2005: 129), etnisitas merupakan penjelasan paling relevan untuk memahami bagaimana kekuatan politik beroperasi pada level agregasi, dengan melihat pengalaman berbagai negara. Di beberapa negara, fragmentasi etnik yang menjadi masalah sementara di negara lain dominasi kelompok etnik tertentu yang menjadi persoalan. Diversitas etnik menjadi penting bukan hanya untuk partai yang secara langsung berkaitan dengan kelompok etnik melainkan juga karena elektabilitas partai nasional sangat tergantung pada struktur etnik dan hal ini akan mempengaruhi nasib partai tersebut.

Dalam konteks masyarakat plural yang sedang mengalami transisi, kepentingan-kepentingan politik dan tingkat partisipasi dalam organisasi mencerminkan polarisasi etnik dalam masyarakat. Tingkat partisipasi dan kepentingan politik etnis yang tinggi bukan merupakan indikasi modal sosial untuk mencapai masyarakat demokratis melainkan merupakan mobilisasi etnis dan *counter* mobilisasi yang mengancam negara demokratis baru. Organisasi komunal dengan demikian belum tentu merupakan organisasi masyarakat (Dowley and Silver, 2003:96).

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami transisi di berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya transisi di dunia politik. Dalam pandangan Nasikun (2006), struktur kepartaian di Indonesia merupakan perwujudan struktur sosialnya. Meskipun pola kepartaian mengalami perubahan dengan dibubarkannya beberapa partai akan tetapi basis sosio kultural boleh dipastikan masih tetap belum seberapa mengalami perubahan. Berhasil tidaknya fusi partai-partai politik misalnya akan sangat tergantung pada seberapa jauh perubahan-perubahan sosial-kultural yang mendasari pola kepartaian di Indonesia itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang.

Meskipun sudah mengalami banyak perubahan, etnisitas diyakini masih menjadi faktor penting yang menentukan afiliasi partai dan peran politik seseorang. Partai Demokrat di Amerika Serikat dengan ideologi politiknya yang inklusif lebih menarik minat imigran kulit berwarna untuk bergabung ke dalamnya dibanding Partai Republik yang dinilai eksklusif. Dalam hal partisipasi politik, penduduk kulit putih di Amerika Serikat berpartisipasi politik lebih tinggi dibanding kulit hitam (Lipset dalam Miriam Budiarjo, 1998: 10). Studi tentang partai politik di Indonesia (Kevin Raymond Evans, 2003) menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa yang didukung Nahdhatul Ulama memiliki basis masa di Jawa Timur sementara Partai Amanat Nasional yang dibentuk oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah mendapat banyak dukungan dari wilayah luar Jawa, khususnya Sumatra Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jelas bahwa afiliasi politik dan partisipasi politik sedikit banyak terkait dengan etnisitas.

Struktur kepartaian di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan antara partai-partai “nasionalis” dan partai-partai yang mengusung ideologi agama. Afiliasi keanggotaan partai berkaitan erat dengan struktur sosial-kultural masyarakat. Menurut Brown (1994:90), periode demokrasi parlementer Indonesia ditandai oleh ketidakstabilan politik di tingkat pusat dan pemberontakan di berbagai daerah. Aktivitas mobilisasi massa berbagai partai politik nasional menunjukkan bagaimana komunalisme etnik dimobilisasi untuk kepentingan integrasi nasional. Partisipasi dalam partai politik nasional ditujukan untuk mendukung isu-isu nasional dan mempromosikan ide bahwa isu lokal dan nasional saling berkaitan. Individu merasionalkan baik identitas individual maupun nasional melalui “kacamata” afiliasi komunalnya. Hubungan antara identitas komunal dan nasional kemudian dikonkritkan oleh jaringan hubungan patron-klien yang mengkaitkan desa dengan pemerintah pusat.

Dari sisi teori, studi etnografi komunikasi melihat komunikasi dari sisi (Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, 2009: 460):

- (1) pola komunikasi yang digunakan oleh sebuah kelompok; (2) mengartikan kegiatan komunikasi ini ada untuk kelompok; (3) kapan dan dimana anggota kelompok menggunakan semua kegiatan ini; (4) bagaimana praktik komunikasi menciptakan sebuah komunitas; (5) keragaman kode yang digunakan oleh sebuah kelompok.

Artinya adalah bahwa komunitas politik dalam sebuah kelompok etnois merupakan hasil komunikasi kelompok etnis tersebut. Egalitarianisme bahasa cenderung akan membentuk masyarakat politik yang egaliter juga. Tata krama dalam bahasa juga akan mengajarkan cenderung membentuk tata masyarakat politik.

Dalam skala mikro rumah tangga, afiliasi politik atau pilihan partai politik seseorang tidak terlepas dari komunikasi politik yang berlangsung di rumah tangga tersebut. Komunikasi politik merupakan media bagi anggota keluarga untuk menentukan pilihan partai politik yang paling rasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan personalnya. Komunikasi politik dalam keluarga juga merupakan ukuran penting kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga. Komunikasi politik dalam keluarga secara khusus dapat mengukur partisipasi politik perempuan dalam tahap awal yakni misalnya inisiatif pembicaraan isu-isu politik dalam keluarga. Dalam penelitian ini komunikasi politik diukur dengan menggunakan indikator: partisipasi perempuan dalam pemberian suara pada pemilu, komunikasi dalam menentukan pilihan partai politik dan atau pasangan calon kepala daerah, serta derajat independensi perempuan dalam menentukan pilihan partai politik, calon legislatif dan atau calon pasangan pemimpin daerah selain indikator inisiatif dalam membicarakan isu-isu politik di keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal inisiatif perempuan untuk membicarakan isu-isu politik (seperti partai politik, calon bupati/walikota, calon gubernur, calon presiden) dengan pasangannya/suami, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara etnik Jawa dan Etnik Semendo. Pada etnik Jawa hanya terdapat 3 orang responden yang menyatakan “kadang-kadang”, 15 orang menyatakan “sering” dan 5 orang menyatakan “sangat sering” dan sisanya sebanyak 77 orang menyatakan “tidak pernah”. Pada etnik Semendo, terdapat 40 orang yang menyatakan “kadang-kadang”, 18 orang yang menyatakan “sering” dan 2 orang yang menyatakan “sangat sering”. Sisanya sebanyak 40 responden menyatakan “tidak pernah”.

Inisiatif perempuan mengajak suaminya untuk membicarakan isu-isu politik merupakan indikator penting untuk melihat “melek politik” di kalangan perempuan yang selama ini identik dengan “imunitas” terhadap persoalan-persoalan politik. Inisiatif perempuan mengajak suaminya membicarakan isu politik dalam penelitian ini meskipun

demikian terlihat tidak selalu ditanggapi oleh suaminya sehingga kemudian tidak terjadi diskusi politik di rumahnya. Pada etnik Semendo, dari 5 orang responden yang mengaku “sangat sering” mengajak suaminya membicarakan masalah politik, akan tetapi ternyata hanya ada 1 responden yang mengaku “sering” juga terjadi diskusi politik di rumah tangganya. Dari 15 orang yang mengaku “sering” mengajak berdiskusi ternyata hanya terdapat 4 orang responden yang menyatakan “sering” pula terjadi diskusi persoalan politik di rumahnya. Pada etnik Jawa, dari 2 orang yang mengaku “sangat sering” mengajak, ternyata hanya ada 1 orang responden yang mengaku “sangat sering” pula terjadi diskusi politik dan dari 18 orang responden yang menyatakan “sering” ternyata hanya ada 4 responden yang menyatakan “sering” terjadi diskusi politik di rumahnya.

Tabel 3

Persiapan Penghitungan Nilai Z untuk Komunikasi Politik
antara Etnik Jawa dengan Etnik Semendo

Indikator	Parameter	Etnik Jawa	Etnik Semendo
Frekuensi perempuan/isteri membicarakan isu politik dengan suami	Jumlah (ΣX)	348	321
	Rerata (\bar{X})	3,48	3,21
	Standar deviasi	0,989643	0,795124
	Nilai Z	2,8 > 1,64 (signifikan $\alpha=0,05$)	
Inisiatif perempuan mengajak suami membicarakan isu politik	Jumlah (ΣX)	355	327
	Rerata (\bar{X})	3,55	3,27
	Standar deviasi	0,757121	0,679498

Nilai Z	2,07 > 1,64	(signifikan
	$\alpha=0,05$)	

Sumber: Analisis Data Primer, 2013.

Dalam hal menentukan pilihan partai politik, calon anggota legislatif ataupun pasangan calon kepala daerah pada umumnya dilakukan musyawarah dulu antara isteri dan suami. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua etnik. Pada etnik Jawa, sebanyak 68 orang responden menyatakan bahwa mereka melakukan musyawarah dulu sebelum menentukan pilihan, sementara sisanya sebanyak 32 orang responden menyatakan tidak pernah bermusyawarah. Pada etnik Semendo, terdapat sejumlah 69 orang responden yang menyatakan melakukan musayawarah, sementara sisanya sebanyak 31 orang menyatakan tidak melakukan musyawarah. Alasan yang paling sering muncul ketika tidak melakukan musayawarah adalah bahwa perempuan merasa yakin dengan pilihannya serta alasan lain yakni bahwa suaminya tidak akan mempersoalkan pilihan politik isterinya.

Tingkat independensi perempuan dalam menentukan pilihan politiknya ternyata sangat tinggi diantara kedua etnik. Masing-masing etnik, sebanyak 96 orang yang mengaku memberikan suara pada pemilu 2009, semuanya menyatakan bahwa pilihannya tersebut merupakan pilihannya sendiri dan tidak ada intervensi dari pihak lain termasuk suaminya sendiri. Tingkat independensi pilihan politik yang tinggi ini secara teoritik menjadi modal sosial penting bagi perempuan untuk berkiprah dalam kancah politik ataupun aktivitas sosial lainnya di masyarakat.

Meski data survey menunjukkan independensi yang tinggi pada perempuan kedua kelompok etnis, tetapi jika dikaji lebih dalam, terdapat pola komunikasi yang berbeda pada kedua kelompok etnis tersebut. Narasumber dari etnis Semendo menyatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan pihak di luar, khususnya dengan pemerintah menyangkut kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan aset keluarga, maka mereka akan membuat keputusan beresam dalam keluarga dan suami atau saudara laki-lakilah yang nantinya akan menyampaikan kepada pihak luar tersebut,

khususnya pemerintah. Sementara itu narasumber dari etnis Jawa menyatakan bahwa umumnya mereka akan langsung berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyuarakan aspirasi mereka, khususnya kelompok perempuan. Dari sisi tata cara berkomunikasi, narasumber etnis Jawa menyatakan bahwa kerumitan dan tata krama bahasa Jawa bukanlah hambatan sosial budaya untuk menjadi perempuan yang mandiri, tetapi justru mereka terdidik untuk dapat berkomunikasi dengan tepat dengan orang dari berbagai tingkatan dan kelompok masyarakat (sumber: wawancara September 2013). Artinya mereka memaknai tata krama dalam berbahasa bukan sebagai hambatan dalam komunikasi politik, tetapi justru sebagai kesempatan belajar komunikasi politik yang efektif dan tepat untuk kelompok-kelompok yang berbeda, bukan hanya dengan suami.

Berkaitan dengan pertanyaan, apakah narasumber etnis Jawa sepakat dengan pernyataan bahwa perempuan adalah *konco wingking* (teman yang selalu berada di belakang) laki-laki, dengan tegas narasumber tersebut menyatakan:

“Saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Saya akan menentang siapapun dan kapanpun kalimat tersebut diucapkan. *Itu pernyataan yang melecehkan perempuan* (diucapkan dengan tekanan oleh narasumber). Kenyataannya kita bisa melakukan apapun yang dilakukan laki-laki. Kita bukan *konco wingking*, kita adalah partner. Benar bahwa kita harus pakai *toto kromo* dengan suami, tetapi tidak berarti kita lebih rendah, *toto kromo* mengajarkan kita bersikap sopan, bukan melecehkan kedudukan. Belajar sopan santun saya kira perlu kita lakukan supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik dengan banyak orang” (sumber: wawancara September 2013)

Jawaban narasumber jelas menunjukkan bahwa struktur bahasa yang selama ini dinilai sebagai hambatan penciptaan komunitas politik yang egaliter (khususnya dalam keluarga) tidak dimaknai demikian oleh para narasumber. Tata krama dan sopan santun dalam berbahasa justru menjadi kesempatan melengkapi diri untuk bisa berkomunikasi politik secara efektif bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dengan masyarakat politik yang lebih luas.

5.5 SOSIALISASI POLITIK

Keluarga merupakan media terpenting dalam transmisi hak-hak istimewa, kekayaan dan modal kultural antar generasi. Namun demikian, sifat pribadi dari kehidupan keluarga menjadi penyebab utama mengapa penyalahgunaan kekuasaan lintas gender dan

generasi tetap tersembunyi dan ditoleransi (Smart, 2006:194-195). Keluarga merupakan agen sosialisasi primer bagi seorang anak oleh karena anak belajar segala sesuatu pada awalnya dimulai dari keluarganya. Jadi dengan demikian keluarga juga merupakan agen sosialisasi politik seorang anak.

Dalam praktek demokrasi aktual, isu mengenai bagaimana pilihan partai tertentu dibentuk berdasarkan kategori-kategori sosial seperti kelas, gender, etnisitas, umur, pendidikan, wilayah atau agama merupakan salah satu tema sentral penelitian akhir abad 19 hingga abad 20 dalam mengeksplorasi bentuk-bentuk tindakan yang berkembang di sekitar struktur konstitusional formal (Markoff, 2005). Meskipun demikian tumbuhnya perhatian dalam studi politik ras masih menyisakan beberapa pertanyaan seperti: apa peranan ras dalam mobilisasi politik dan konflik dalam masyarakat maju dan industrial saat ini, bagaimana agensi politik berhubungan dengan struktur sosial dalam membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai politik ras? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi inti perdebatan teoritik tentang perubahan politik ras dan etnisitas yang berkembang saat ini. Perdebatan itu difokuskan khusus pada bagaimana kita dapat memahami hubungan antara ras, politik dan perubahan sosial dalam konteks kekinian (Solomos and Schuster, 2002:305).

Dalam penelitian ini sosialisasi politik dalam keluarga dibedakan menjadi dua bagian yakni sosialisasi yang dilakukan terhadap anak-anak yang masih di bawah 17 tahun dan sosialisasi terhadap anak-anak yang sudah berumur lebih dari 17 tahun yang secara politis sudah memiliki hak politik. Sosialisasi politik terhadap anak yang berumur di bawah 17 tahun meliputi peran orang tua dalam mengarahkan pilihan cita-cita anak, pilihan sekolah anak dan keputusan-keputusan penting bagi kehidupan anak.

Tabel 4
Perbandingan Pola Sosialisasi Politik dalam Keluarga yang memiliki anak <17 Tahun
Antara Etnik Jawa dengan Etnik Semendo

No	Aspek Sosialisasi Politik untuk keluarga yang memiliki anak <17 tahun	Etnik Jawa	Etnik Semendo
		n=100	n=100
1	Mengarahkan pilihan cita-cita anak		
	a. Tidak punya anak	5	6
	b. Lebih banyak suami	6	2
	c. Lebih banyak istri	13	35
	d. Keduanya	56	49
	e. Lainnya	20	8
2.	Mengarahkan pilihan sekolah anak		
	a. Tidak punya anak	5	6
	b. Lebih banyak suami	5	1
	c. Lebih banyak istri	18	1
	d. Keduanya	51	74
	e. Lainnya	21	18
3.	Mengarahkan anak untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi dirinya		

a. Tidak punya anak	5	6
b. Lebih banyak suami	2	2
c. Lebih banyak istri	36	1
d. Keduanya	49	80
e. Lainnya	8	1

Sumber: Analisis Data Primer, 2013.

Sementara itu sosialisasi politik untuk keluarga yang memiliki anak >17 tahun diukur melalui indikator: peran dalam mengarahkan pilihan partai politik/caleg dan pasangan calon kepala daerah dan peran dalam mengarahkan pilihan calon kepala desa. Pada etnik Semendo sebanyak 44 orang responden yang memiliki anak di atas 17 tahun, 19 responden diantaranya mengaku bahwa mereka memberikan pengarahan kepada anaknya sebelum melakukan pemungutan suara pada pemilu 2009 lalu. Sisanya sebanyak 25 responden menyatakan bahwa mereka tidak memberikan pengarahan kepada anaknya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pilihan diserahkan kepada anaknya karena hal itu merupakan hak asasi mereka. Selain itu juga ada alasan lain yakni anak tidak mau diarahkan dan karena orangtua merasa bahwa anaknya sudah dewasa sehingga mereka dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Pada etnik Jawa, dari 34 orang responden yang memiliki anak di atas 17 tahun, sebagian besar yakni 33 orang responden menyatakan melakukan pengarahan kepada anaknya mengenai pilihan partai politik/calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah. Hanya ada 1 orang responden yang mengaku tidak melakukan pengarahan.

Dalam pilihan kepala desa, pada etnik Semendo, dari 44 orang responden yang memiliki anak di atas 17 tahun, sebanyak 15 responden diantaranya mengaku bahwa mereka memberikan pengarahan kepada anaknya sebelum pemungutan pilihan kepala desa. Sisanya sebanyak 29 responden tidak memberikan pengarahan. Pada etnik Jawa, sama halnya dengan pemilu 2009, dalam pemilihan kepala desa, para responden juga

mengaku tidak memberikan pengarahan kepada anaknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi politik dalam pembentukan sikap kebebasan melakukan pilihan politik berjalan lebih baik dan egaliter pada etnik Semendo dibandingkan dengan keluarga etnik Jawa.

5.6 RESPON TERHADAP PERBEDAAN ASPIRASI POLITIK

Respon terhadap perbedaan aspirasi politik dalam penelitian ini diukur dari perbedaan aspirasi politik pada pemilu 2009 dan pilkada serta pemaksaan terhadap perempuan berkaitan dengan pilihan partai politik/calon legislatif/pasangan calon kepala daerah. Pada etnik Semendo, sebanyak 12 responden menyatakan bahwa mereka mempunyai perbedaan pilihan partai politik/calon legislatif dengan suaminya pada pemilu 2009. Sebanyak 79 responden menyatakan tidak (pilihannya sama dengan pilihan suaminya) dan sebanyak 9 orang responden menyatakan “tidak tahu”. Dari sebanyak 12 responden yang memiliki perbedaan aspirasi tersebut, 5 orang responden diantaranya menyatakan bahwa hal tersebut menjadi persoalan di kemudian hari dan 7 orang responden menyatakan “tidak” bermasalah. Sikap yang diambil perempuan berkaitan dengan perbedaan aspirasi politik tersebut adalah “tetap pada pilihannya dan tidak merahasiakan pilihannya tersebut” (11 responden) dan hanya 1 responden yang menyatakan “tetap pada pilihannya dan merahasiakan pilihannya”.

Pada etnik Jawa, sebanyak 24 orang responden menyatakan bahwa mereka mempunyai perbedaan pilihan partai politik/calon legislatif dengan suaminya. Sebanyak 40 responden menyatakan “tidak” dan 36 responden menyatakan “tidak tahu”. Dari sebanyak 24 orang yang menyatakan mempunyai perbedaan pilihan politik tersebut, hanya terdapat 2 orang responden yang menyatakan “menjadi persoalan di kemudian hari” dan sisanya sebanyak 22 orang responden menyatakan “tidak”. Respon yang diambil perempuan berkaitan dengan perbedaan aspirasi politik tersebut adalah “tetap pada pilihannya sendiri dan tidak merahasiakan pilihannya” (21 responden) dan hanya 3 orang responden yang menyatakan “tetap pada pilihannya dan merahasiakan pilihannya”.

Pada pilkada terakhir yang dilakukan, terdapat pola yang hampir sama. Pada etnik Semendo, hanya terdapat 1 orang responden yang menyatakan memiliki perbedaan pilihan pasangan calon kepala daerah. Sebanyak 94 responden menyatakan “tidak” dan sisanya sebanyak 5 orang menyatakan “tidak tahu”. Responden yang menyatakan ada perbedaan pilihan pasangan calon menyatakan bahwa dirinya tetap pada pilihannya dan tidak merahasiakan pilihannya. Pada etnik Jawa, terdapat 6 orang responden yang memiliki perbedaan pilihan pasangan calon kepala daerah dengan suaminya, 53 orang responden menyatakan “tidak” dan sisanya sebanyak 41 responden menyatakan “tidak tahu”. Dari sebanyak 6 orang responden yang menyatakan terdapat perbedaan pilihan, 4 orang diantaranya menyatakan “tetap pada pilihannya dan tidak merahasiakan pilihannya” dan 2 orang responden lainnya menyatakan “tetap pada pilihannya dan merahasiakan pilihannya”.

Hasil tersebut nampak kongruen dengan pemaksaan yang dilakukan suami. Secara umum, hampir tidak ada pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isterinya di kalangan kedua etnik. Pada etnik Semendo, hanya terdapat 4 orang responden yang menyatakan “kadang-kadang” ada pemaksaan dari suaminya dan 1 orang yang menyatakan “pernah sekali”, dan sisanya 95 orang menyatakan “tidak pernah”. Pada etnik Jawa, sebanyak 3 orang responden yang menyatakan “kadang-kadang” dan 2 orang menyatakan “pernah sekali” dan sisanya sebanyak 95 orang menyatakan tidak pernah ada pemaksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan politik yang cukup tinggi di antara kedua etnik.

5.7 KEBEBASAN POLITIK PEREMPUAN

Ukuran-ukuran modal sosial yang biasa digunakan nampak problematik dalam masyarakat plural, khususnya pada masa transisi politik yang berlangsung cepat. Sebagai contoh, teoritis yang mempelajari komunitas sipil pada umumnya melihat derajat “*civiness*” dengan menggunakan ukuran tingkat partisipasi dalam organisasi-organisasi voluntir (termasuk organisasi-organisasi agama), tingkat kepentingan dalam politik dan tingkat kepercayaan interpersonal. Akan tetapi dalam masyarakat plural yang sedang

mengalami transisi, kepentingan-kepentingan dalam politik dan tingkat partisipasi dalam organisasi mencerminkan polarisasi etnik dalam masyarakat. (Dowley and Silver, 2003:96).

Kebebasan politik perempuan dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator: 1) upaya untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pemilu/pilkada, 2) kebebasan mencari informasi tersebut, 3) keterlibatan dalam kegiatan *rembug* desa, 4) keterlibatan dalam kegiatan LKMD/LMD, 5) kebebasan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut, 6) keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan 7) kebebasan dalam mengikuti sosial.

Pada etnik Semendo, sebanyak 46 responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi yang cukup memadai dan 54 responden menyatakan tidak mendapatkan informasi yang memadai berkaitan dengan pemilu 2009 lalu. Data ini konsisten dengan upaya untuk mencari informasi. Sebanyak 47 responden mengaku berusaha mencari informasi mengenai pemilu, pilkada ataupun pilihan kepala desa. Dalam hal kebebasan untuk mencari informasi, sebanyak 9 responden menyatakan “sangat bebas”, 84 responden menyatakan “cukup bebas” dan 7 responden menyatakan “tidak bebas”. Stereotipe kegiatan politik yang identik dengan laki-laki, nampak pada peran serta perempuan dalam kegiatan-kegiatan publik tingkat lokal yang mendiskusikan persoalan publik seperti kegiatan *rembug* desa (musyawarah tingkat desa) dan kegiatan perencanaan pembangunan seperti kegiatan LKMD/LMD. Dari seluruh responden etnik Semendo, hanya ada 6 responden yang mengaku “sering kali” mengikuti kegiatan *rembug* desa. Sebanyak 34 responden menyatakan “kadang-kadang”, 23 responden menyatakan “jarang” dan sisanya sebanyak 37 responden menyatakan “tidak pernah”. Data tersebut tidak jauh berbeda dengan data mengenai keterlibatan dalam kegiatan LKMD/LMD. Hanya terdapat 1 responden yang menyatakan “sering kali” mengikuti kegiatan tersebut, 15 responden menyatakan “kadang-kadang”, 37 responden menyatakan “jarang” dan sisanya sebanyak 47 responden menyatakan “tidak pernah”. Rendahnya peran perempuan dalam berbagai kegiatan politik kemungkinan berkorelasi dengan tingkat kebebasannya mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini hanya terdapat 4 responden yang menyatakan “sangat bebas”, 59 responden menyatakan “kurang bebas” dan 37 responden

menyatakan “tidak bebas”. Rendahnya tingkat kebebasan dalam mengikuti kegiatan politik mengindikasikan kuatnya hambatan kultural politik perempuan.

Jika kebebasan berpolitik bagi perempuan masih rendah, tidak demikian halnya dengan kebebasan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial seperti arisan, pengajian, PKK/Dharma Wanita, Dasa Wisma merupakan tipikal kegiatan ibu-ibu. Data menunjukkan bahwa pada etnik Semendo, sebanyak 60 responden menyatakan “sering kali” mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, 24 responden menyatakan “kadang-kadang”, 10 orang responden menyatakan “jarang” dan sisanya hanya sebanyak 6 orang menyatakan “tidak pernah”. Tingginya tingkat keterlibatan perempuan mengikuti kegiatan berkorelasi dengan tingkat kebebasan mengikuti kegiatan tersebut. Sebanyak 31 responden menyatakan “sangat bebas”, sebanyak 63 responden menyatakan “cukup bebas” dan hanya 6 responden menyatakan “tidak bebas”.

Sementara itu pada etnik Jawa, 85 responden menyatakan mendapatkan informasi yang cukup memadai berkaitan dengan pemilu 2009 lalu, dan 15 responden lainnya menyatakan “tidak”. Dalam upayanya mencari informasi mengenai pemilu, hanya sebanyak 7 responden yang mengaku mencari informasi, sementara 93 responden menyatakan “tidak”. Kebebasan untuk memperoleh informasi pada perempuan etnik Jawa cukup tinggi yakni sebanyak 78 responden menyatakan “sangat bebas”, sebanyak 18 responden menyatakan “cukup bebas”, dan hanya 4 responden yang mengaku “tidak bebas”. Namun demikian kebebasan tersebut nampaknya tidak digunakan untuk mencari informasi yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mungkin informasi yang telah didapatkan telah cukup memadai. Kebanyakan informasi yang berkaitan pemilu diperoleh melalui alat peraga kampanye seperti baliho, brosur, kalender dan sebagainya. Stereotipe bahwa kegiatan politik merupakan kegiatan yang “maskulin” juga nampak pada etnik Jawa. Keterlibatan perempuan Jawa dalam kegiatan politik seperti rembug desa atau semacamnya nampak sangat rendah. Dalam hal ini, hanya 6 responden yang menyatakan “sering kali” mengikuti kegiatan tersebut, 4 responden menyatakan “kadang-kadang”, 11 responden menyatakan “jarang”, dan sisanya sebanyak 79 responden menyatakan “tidak pernah”. Demikian pula dalam kaitannya dengan keterlibatan pada kegiatan LKMD/LMD. Hanya sebanyak 8 responden yang menyatakan “sering kali”, 2 orang responden

menyatakan “kadang-kadang” , 4 orang menyatakan “jarang” dan sebagian besar lainnya sebanyak 86 responden menyatakan “tidak pernah”. Kebebasan untuk mengikuti kegiatan tersebut pada etnik Jawa cukup tinggi terbukti sebanyak 73 responden menyatakan “sangat bebas”, 16 responden menyatakan “cukup bebas”, 2 orang menyatakan “kurang bebas” dan sisanya sebanyak 9 orang menyatakan “tidak bebas”. Hampir sama dengan perempuan etnik Semendo, kegiatan-kegiatan sosial juga masih merupakan kegiatan yang “tipikal” ibu-ibu. Sebanyak 64 responden menyatakan “sering kali” mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti arisan, pengajian, PKK, Dharma Wanita, Dasa Wisma dan lain-lain. Sebanyak 21 responden menyatakan “kadang-kadang”, 6 orang responden menyatakan “jarang” dan sisanya sebanyak 9 orang menyatakan “tidak pernah”. Tingkat kebebasan untuk mengikuti kegiatan tersebut pada perempuan etnik Jawa juga cukup tinggi yakni sebanyak 86 orang responden menyatakan “sangat bebas”, 9 orang responden menyatakan “cukup bebas” , 1 orang menyatakan “kurang bebas” dan sisanya sebanyak 4 responden menyatakan “tidak bebas”.

Data kuantitatif tentang kebebasan politik menunjukkan bahwa perempuan etnis Semendo relatif lebih bebas dalam mencari informasi dan menentukan pilihan pada beberapa jenis pemilihan dibanding perempuan etnis Jawa. Data kuantitatif ini ternyata berbeda dengan hasil wawancara mendalam yang menunjukkan bahwa marasumber etnis Jawa jauh lebih bebas dalam interaksi politik dengan suami mereka serta lebih banyak terlibat pada berbagai forum aktivitas publik dan politik. Aspek penting yang bisa dipelajari dari perbedaan data ini adalah bahwa secara komunal, perempuan etnis Semendo lebih egaliter dalam hubungan politik dengan suami mereka dan lebih *curious* atau lebih ingin mencari informasi politik berkenaan dengan peristiwa politik dibanding dengan perempuan etnis Jawa secara umum. Meski demikian, komunitas politik etnis Jawa ternyata menghasilkan elit politik perempuan yang jauh lebih bebas dan terlibat dalam kehidupan politik dibanding komunitas politik perempuan Semendo. Hasil ini memperkuat argumen Liddle (1996) bahwa etnis Jawa menghasilkan elit-elit yang dominan dalam kehidupan politik dibanding etnis lain, serta pendapat Sutherland (1979) bahwa kultur Jawa menghasilkan hubungan *patron-client* antara elit dengan. Kedua argumen ini menunjukkan bahwa budaya Jawa yang tidak egaliter menghasilkan elit

politik yang sangat dominan dan massa yang cenderung apatis, sementara budaya di luar Jawa (dalam riset ini diwakili etnis Semendo) menghasilkan kultur politik yang lebih terbuka dan egaliter tanpa perbedaan yang sangat menonjol antara elit dan massanya. Hasil riset di kedua kelompok etnis ini cenderung mendukung tesis-tesis tersebut.

5.8 SIKAP TERHADAP HALANGAN SOSIO-BUDAYA KETERLIBATAN POLITIK PEREMPUAN

Teori-teori sosiologi tentang etnisitas secara umum dibedakan antara dua pendekatan yakni “*the circumstantial*” dan “*the primordial*”. Pendekatan pertama menekankan basis instrumental etnisitas khususnya peran tindakan rasional berdasar kepentingan diri, sementara pendekatan kedua menekankan identitas berbasis ikatan-ikatan efektif. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelemahan dalam menjelaskan persoalan batas-batas etnisitas termasuk kriteria yang menentukan keanggotaan kelompok etnik tertentu (Chai, 2005). Dalam pandangan Jones (1997:126), kedua pendekatan tersebut meskipun demikian dapat ditransendensikan. Representasi dan praktik budaya diobyektifikasi sebagai simbol etnisitas yang diderivasikan dari dan beresonansi dengan pengalaman dan kebiasaan masyarakat sekaligus merefleksikan kontingensi instrumental situasi khusus.

Kerangka teori etnisitas jelas menunjukkan bahwa perjuangan identitas etnik dilancarkan bukan oleh komunitas suku terasing, melainkan oleh komunitas budaya politik yang dipolitisasi kedalam jaring modernitas. Penegasan identitas esensinya merupakan perjuangan memajukan masyarakat dan dapat diakomodasi dalam stuktur negara bangsa (Srikanth and Ngaithe, 2011). Dalam konteks Indonesia yang memiliki ratusan kelompok etnis, keragaman budaya menjadi keniscayaan sehingga dengan demikian upaya-upaya “penyeragaman” menjadi bersifat kontraproduktif bagi harmonisasi dan integrasi sosial. Masing-masing kelompok etnis memiliki keunikan dalam pandangan hidup, adat istiadat, dan properti budaya lain yang berusaha dipertahankan oleh anggota kelompoknya, sehingga upaya penyeragaman tersebut sering mendapat perlawanan.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan Schiller (1996) menunjukkan bahwa agama asli orang Dayak *Ngaju* di Kalimantan Tengah pada tahun 1980, telah diakui oleh Departemen Agama sebagai agama resmi (Hindu) yang sebelumnya dianggap sebagai “adat”. Sekalipun sebagian besar orang *Ngaju* telah dikonversikan ke agama “dunia”, namun sekelompok minoritas yang semakin vokal tetap mengklaim status primordialnya sebagai etnis *Ngaju*. Peran agama dalam etnisitas akan terus saling berebut, bahkan ketika masyarakat berusaha membangun dan berpartisipasi dalam politik identitas baik tingkat lokal maupun nasional.

Suku Wana di Sulawesi Tengah menurut Atkinson (1985) juga mengalami tekanan karena kepercayaan tradisionalnya dianggap bukan sebagai agama. Hal tersebut terjadi dalam pandangan Dove (1985) karena kekeliruan melihat kebudayaan tradisional dalam konstelasi pembangunan nasional. Apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap sebagai keterbelakangan. Kekeliruan tersebut mencakup banyak aspek kehidupan seperti ideologi, ekonomi, ekologi dan perubahan sosial/struktur sosial.

Dalam bidang politik terutama pada masa orde baru terjadi mobilisasi politik massa luar biasa ke dalam partai-partai nasional. Hampir tidak mungkin partai lokal muncul dalam struktur kepartaian nasional. Pada masa reformasi paska tumbangnya era orde baru, hanya terdapat satu daerah yakni Aceh yang diperolehkan lahir partai daerah. Fenomena politik lain yang terjadi pada masa reformasi ini adalah munculnya ratusan partai politik baru. Fenomena di satu sisi memang menunjukkan peningkatan kebebasan berekspresi di kalangan masyarakat namun di sisi lain juga muncul berbagai keraguan dan kekhawatiran. Diantara keraguan tersebut adalah, apakah munculnya partai tersebut aspirasi masyarakat dapat secara otomatis tertampung dan tersalurkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah dengan munculnya partai politik baru tersebut mampu membawa kehidupan yang lebih demokratis? Sementara kekhawatiran yang muncul adalah, timbulnya konflik dan friksi antar partai yang semakin tajam dan hal ini berimplikasi luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara.

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya mencakup perilaku pemerintah atau suprastruktur melainkan bagaimana suprastruktur politik mengakomodasi ide, budaya dan

sikap masyarakat dalam pengembangan demokrasi. Hal ini penting mengingat keterlibatan rakyat dalam berbagai aktivitas hidup berbangsa merupakan indikator utama demokratisasi suatu negara. Negara yang demokratis adalah negara yang memberi ruang gerak yang luas bagi rakyat untuk melibatkan diri dalam menentukan berbagai hal berkaitan dengan kehidupan bersamanya secara bebas.

Namun kenyataannya, pemberdayaan politik masyarakat di Indonesia selama lebih dari tiga dekade mengalami hambatan besar mengingat peran negara yang sangat dominan. Selain itu pemberdayaan politik masyarakat juga tidak merata ke seluruh segmen masyarakat. Perempuan dalam hal ini merupakan segmen masyarakat yang paling tertinggal. Perempuan merupakan segmen masyarakat yang paling tertindas baik dalam ranah domestik maupun publik. Partisipasi politik perempuan masih banyak mengalami hambatan kultural dan struktural. Rintangan kultural utama adalah berupa pelabelan (*stereotyping*) perempuan misalnya skeptisisme ketika melihat sosok perempuan tampil di wilayah publik (politik). Implikasinya, tingkat representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan populasi perempuan itu sendiri. Pengambilan keputusan yang strategis dengan demikian masih didominasi oleh laki-laki yang kebanyakan tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*). Akibatnya kebijakan publik yang muncul kemudian banyak yang bias laki-laki (*male biased*).

Dalam penelitian ini, hambatan kultural peran politik perempuan dilihat dari beberapa indikator yakni sikapnya terhadap: 1) peran utama perempuan dalam keluarga, 2) peran laki-laki sebagai pengambil keputusan terakhir, 3) pandangan dunia politik, 4) sosok perempuan sebagai pemimpin, 5) peran politik perempuan, 6) independensi perempuan dalam kegiatan di luar rumah, 7) kebebasan berpendapat perempuan, 8) dukungan masyarakat terhadap peran politik perempuan di tingkat *grass root*, dan 9) dukungan masyarakat terhadap peran perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Berikut paparan hasil penelitian dari indikator-indikator yang dimaksud.

Tabel 5
Perbandingan Sikap Terhadap Halangan Sosio-Budaya Keterlibatan Politik Perempuan
antara Etnik Jawa dengan Etnik Semendo

No	Pernyataan	Semendo				Jawa			
		SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
1	Tugas perempuan yang paling penting adalah mengurus rumah dan memasak untuk keluarganya	21	73	6	0	30	29	29	12
2	Laki-laki merupakan pengambil keputusan penting dalam rumah	30	64	6	0	25	29	36	10
3	Dunia politik adalah dunia yang keras dan kotor sehingga tidak cocok untuk perempuan	2	34	61	3	7	17	55	21
4	Tidak menjadi masalah jika perempuan menjadi bupati, gubernur, menteri atau presiden	12	86	2	0	44	47	6	3
5	Tidak menjadi masalah jika perempuan ikut aktif terlibat dalam partai politik atau menjadi wakil rakyat	12	85	2	1	45	48	5	2
6	Menurut saya, jika perempuan akan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, maka harus sejin suami	50	49	1	0	77	21	0	2
7	Menurut saya, isteri mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan suami	3	94	3	0	62	35	3	0
8	Menurut saya, perempuan tetap boleh terlibat dalam kegiatan politik meskipun banyak yang menentangnya	0	69	31	0	44	46	8	2
9	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung tokoh perempuan untuk menjadi kepala desa	1	74	21	4	42	57	1	0
10	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung jika perempuan ikut terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik ataupun kampanye calon kepala desa/kelurahan	3	83	13	1	43	55	1	1
11	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan	7	88	5	0	52	46	1	1

Sumber: Analisis Data Primer, 2013.

Tabel 6
 Persiapan Perhitungan Nilai Z Perbandingan Sikap Terhadap Halangan Sosio-Budaya
 Keterlibatan Politik Perempuan antara Etnik Jawa dengan Etnik Semendo

No	Pernyataan	Jawa			Semendo			Nilai Z	Sign. ($\alpha=0,05$)
		Σ	\bar{X}	δ	Σ	\bar{X}	δ		
1	Tugas perempuan yang paling penting adalah mengurus rumah dan memasak untuk keluarganya	223	2,23	1,01	185	1,85	0,5	3,37	Signifikan
2	Laki-laki merupakan pengambil keputusan penting dalam rumah	231	2,31	0,96	176	1,76	0,55	4,97	Signifikan
3	Dunia politik adalah dunia yang keras dan kotor sehingga tidak cocok untuk perempuan	290	2,90	0,81	265	2,65	0,57	2,52	Signifikan
4	Tidak menjadi masalah jika perempuan menjadi bupati, gubernur, menteri atau presiden	168	1,68	0,72	190	1,90	0,36	2,40	Signifikan
5	Tidak menjadi masalah jika perempuan ikut aktif terlibat dalam partai politik atau menjadi wakil rakyat	164	1,64	0,67	192	1,92	0,42	3,54	Signifikan
6	Menurut saya, jika perempuan akan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, maka harus seijin suami	127	1,27	0,56	151	1,51	0,52	3,14	Signifikan
7	Menurut saya, isteri mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan suami	141	1,41	0,55	200	2,00	0,25	2,30	Signifikan
8	Menurut saya, perempuan tetap boleh terlibat dalam kegiatan politik meskipun banyak yang menentangnya	168	1,68	0,71	231	2,31	0,46	7,42	Signifikan
9	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung tokoh perempuan untuk menjadi kepala desa	159	1,59	0,51	228	2,28	0,55	9,20	Signifikan
10	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung jika perempuan ikut terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik ataupun kampanye calon kepala desa/kelurahan	160	1,60	0,57	212	2,12	0,43	7,28	Signifikan
11	Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan	151	1,51	0,58	198	1,98	0,35	6,94	Signifikan

Sumber: Analisis Data Primer, 2013

Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai sikap terhadap halangan sosio budaya keterlibatan politik perempuan antara etnik Jawa dengan etnik Semendo. Secara umum, perempuan Jawa memiliki pandangan yang lebih kosmopolit dan menunjukkan kesetaraan gender dibanding perempuan etnik Semendo. Hal ini terlihat dari semua indikator sikap. Indikator pertama yang merupakan sikap terhadap peran utama perempuan dalam rumah tangga, perempuan etnik Jawa menunjukkan sikap yang lebih setara gender dibandingkan dengan perempuan etnik Semendo. Dalam hal ini, perempuan Jawa lebih menunjukkan sikap ketidaksetujuannya terhadap peran utama perempuan yang hanya memasak untuk keluarganya. Demikian pula sikapnya mengenai peran laki-laki sebagai pengambil keputusan terakhir dalam rumahtangga, perempuan Jawa lebih menunjukkan sikap penentangan terhadap pernyataan tersebut. Sebaliknya perempuan Semendo cenderung mendukung pandangan yang mengarah ketidakadilan gender.

Pernyataan bahwa “dunia politik adalah dunia yang keras dan kotor sehingga tidak cocok untuk perempuan” cenderung dibenarkan oleh mayoritas perempuan dari kedua kelompok etnik. Meskipun demikian terdapat perbedaan signifikan antara keduanya dalam arti perempuan Jawa cenderung kurang meyakini terhadap pernyataan tersebut dibandingkan perempuan Semendo. Sikap perempuan terhadap peran politik perempuan yang dinyatakan dengan dua pernyataan yakni “Tidak menjadi masalah jika perempuan menjadi bupati, gubernur, menteri atau presiden” dan “Tidak menjadi masalah jika perempuan ikut aktif terlibat dalam partai politik atau menjadi wakil rakyat”, juga cenderung dibenarkan oleh kedua kelompok etnik. Sikap terhadap kedua pernyataan tersebut juga terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok etnik, dimana perempuan Jawa cenderung lebih mendukung terhadap kedua pernyataan tersebut.

Ijin dari suami ketika perempuan akan beraktivitas di luar rumah, nampaknya merupakan “aturan main” yang berlaku secara umum di kedua kelompok etnik. Hanya saja intensitas dukungan perempuan Jawa secara umum lebih tinggi dibandingkan perempuan Semendo. Hal ini terlihat dari frekuensi jawaban “sangat setuju” yang lebih

besar pada perempuan etnik Jawa. Pernyataan “Menurut saya, isteri mempunyai hak untuk berbeda pendapat dengan suami”, merupakan ukuran tingkat independensi perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kedua kelompok etnis menunjukkan tingkat independensi yang berbeda. Tingkat independensi perempuan Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan Semendo. Hal ini terlihat dari frekuensi jawaban “sangat setuju” yang lebih banyak dibandingkan perempuan Semendo.

Perbedaan tingkat independensi juga terlihat pada pernyataan mengenai kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan politik meskipun banyak pihak yang menentangnya. Pernyataan “Menurut saya, perempuan tetap boleh terlibat dalam kegiatan politik meskipun banyak yang menentangnya” lebih mendapat persetujuan oleh perempuan etnik Jawa dibandingkan perempuan etnik Semendo. Terakhir sikap terhadap hambatan sosial-budaya keterlibatan politik perempuan diukur dari persepsi mengenai dukungan masyarakat sekitar terhadap keterlibatan sosial politik perempuan di tingkat lokal. Dalam hal ini ditanyakan mengenai sikapnya terhadap tiga pernyataan yakni: 1) “Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung tokoh perempuan untuk menjadi kepala desa”, 2) Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung jika perempuan ikut terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik ataupun kampanye calon kepala desa/kelurahan dan 3) Menurut saya, masyarakat sekitar sini cukup mendukung perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Terhadap ketiga pernyataan tersebut, nampak jelas bahwa perempuan Jawa cenderung mempersepsikan bahwa masyarakat sekitarnya relatif mendukung peran dan keterlibatan baik sebagai calon pemimpin lokal (kepala desa) maupun kegiatan politik dan kemasyarakatan.

Data kuantitatif yang menunjukkan bahwa responden dari etnis Jawa cenderung menganggap bahwa faktor sosial budaya tidak terlalu menghambat peran politik perempuan dibanding responden perempuan etnis Semendo perlu dikaji dengan lebih hati-hati. Secara sosial, responden etnis Jawa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding responden etnis Semendo (Tabel 1). Etnis Jawa juga lebih terekspos terhadap kemajuan karena tinggal di bagian Kota Metro, dibanding responden etnis Semendo yang tinggal di wilayah pedesaan. Dari karakteristik ekonomi responden etnis Jawa juga mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik dibanding responden etnis

Semendo. Kesemua hal ini menunjukkan bahwa etnisitas bukan satu-satunya aspek dalam sikap terhadap hambatan sosial budaya. Berbagai hasil penelitian seperti dikutip Dalton (1985) dan Randal (1987) menunjukkan bahwa orang dengan status sosial budaya lebih tinggi cenderung memiliki sikap politik yang positif dan perilaku politik yang lebih partisipatif. Selain itu faktor lokasi tempat tinggal kelompok juga penting. Karena itu riset ini merupakan refleksi peran politik perempuan dari dua etnis yang tidak semata berbeda karena etnisitasnya, tetapi juga lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan serta ekonomi yang berbeda.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Secara umum terdapat perbedaan peran politik perempuan antara etnik Jawa dengan etnik Semendo terutama dalam relasi politik antara laki-laki dan perempuan, tingkat independensi perempuan dalam menentukan pilihan-pilihan/keputusan-keputusan dalam bidang politik dan rintangan sosio-kultural yang mencegah perempuan terlibat dalam dunia politik (publik). Beberapa aspek relasi gender yang berbeda meliputi aspek: pengawasan keuangan keluarga oleh suami, pengambilan keputusan strategis (terutama pilihan pendidikan anak dan pembelian barang mahal), frekuensi perempuan/isteri membicarakan isu politik dengan pasangannya, inisiatif perempuan/isteri mengajak suami membicarakan isu politik, sosialisasi politik anak di bawah 17 tahun, kebebasan menentukan pilihan calon pemimpin lokal, kebebasan dalam berperan dalam lembaga politik lokal dan seluruh indikator rintangan sosio-kultural yang mencegah perempuan terlibat dalam dunia politik (publik). Sementara itu, beberapa aspek relasi gender yang sama hanya meliputi empat aspek yakni pola pengelolaan keuangan keluarga, pola sosialisasi anak (berumur >17 tahun), kebebasan menentukan partai politik dan kebebasan dalam berperan dalam lembaga kemasyarakatan lokal.

6.2 SARAN

1. Upaya peningkatan peran politik perempuan hendaknya dimulai secara bertahap dengan mendorong perempuan terlibat dalam lembaga-lembaga politik tingkat lokal seperti misalnya Rukun Tetangga (RT), LKMD, rembug desa dan sebagainya. Keterlibatan perempuan dalam lembaga politik lokal tersebut merupakan media pembelajaran bagi perempuan sebelum berperan politik pada arena yang lebih luas. Upaya tersebut harus disertai dengan upaya mengeliminasi hambatan-hambatan sosio-kultural masyarakat setempat melalui program-program penyetaraan relasi gender.

2. Penelitian ini memiliki limitasi terutama belum memperhatikan karakteristik sosial lain seperti tingkat pendidikan perempuan dan tipologi daerah. Disarankan penelitian lanjutan memperhatikan berbagai variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan (ed.), 1997, *Sangkan Paran Gender*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Ahmad, Yasmin and Najeemah Mohd Yusof. 2012. Social distance and ethnic boundary among pupils in multiethnic and monoethnic school environment in Malaysia. *Science Journal of Sociology & Anthropology*. Issue 2: 1-17.
- Ahmadi, Yaaghob and Anwar Shahmohamadi. 2011. Self-expression values of Ethnicities (Study of Iran and Iraq Kurdish). *International Journal of Humanities and Social Science*. 1 (15):192-201.
- Anugwom, Edlyne E. 2000. Ethnic Conflict and Democracy in Nigeria: The Marginalisation Question. *Journal of Social Development in Africa*. 15 (1):61-78.
- Arivia, Gadis, 1999, " Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan" dalam *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Atkinson, Jane Monnig. 1985. Agama dan Suku Wana di Sulawesi Tengah. Dalam Michael R. Dove. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 1997, *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 1995-2005*, Jakarta.
- Bainar (ed), 1998, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Bhasin, Kamla, 1996, *Menggugat Patriarkhi*, Gramedia. Jakarta.
- Blagojevic, Bojana. 2009. Causes of ethnic conflict: a conceptual framework. *Journal of Global Change and Governance*. III (1): 1-25.
- Blood, Robert O. Jr and Donald M Wolf, 1960, "Husbands and Wives". *The Dynamics of Married Living*. The Free Press, New York.
- Boserup, Ester, 1984, *Peranan Wanita Dalam perkembangan Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Brannen, Julia, 1997, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Brown, David. 1994. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. First published. London and New York: Routledge.
- Brown, Cliff and Terry Boswell. 1997. Ethnic conflict and political violence: a cross-national analysis. *Journal of Political and Military Sociology*. 25 (1): 111-130.
- Brown, Tony N. 2008. Race, racism, and mental health: elaboration of critical race theory's contribution to the sociology of mental health. *Contemporary Justice Review*. 11 (1): 53-62.
- Budiman, Arief, 1981, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia. Jakarta.
- Cernea, Michael, 1978, "Macrossocial Change, Feminization of Agricultural and Peasant Women's. Threefold Economics Role". *Sociologi Rurals*, Vol. 18 No 2/3.
- Chai, Sun-Ki. 2005. Predicting Ethnic Boundaries. *European Sociological Review*. 21(4):375-391.
- Cooney, Mark. 2009. Ethnic conflict without ethnic groups: a study in pure sociology. *The British Journal of Sociology*. 60(3): 473-492.

- Crutchfield, Robert D., April Fernandes & Jorge Martinez. 2010. Racial and ethnic disparity and criminal justice: how much is too much? *The Journal of Criminal Law & Criminology*. 100 (3): 903-932.
- Cuff, E.C., W.W. Sharrock, and D.W. Francis. 2006. *Perspective in Sociology*. Fifth edition. London and New York: Routledge.
- Deeds, Susan M. 2008. Gender, Ethnicity, and Agency in Latin American History. *Journal of Women's History, Volume 20 Number 4*, 2008. Hal 195-202.
- Dove, Michael R. 1985. Pendahuluan. Dalam Michael R. Dove. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dowley, Kathleen M. and Silver, Brian D. 2003. Social capital, ethnicity and support for democracy in the post-communist states. In Gabriel Badescu and Eric M. Uslaner (eds.). *Social Capital and the Transition to Democracy*. First published. London and New York: Routledge.
- Durham, Meenakshi Gigi. 2005. Sexuality and the Subject. In George Ritzer (ed). *Encyclopedia of Social Science*. Vol I. Thousand Oak, London, New Delhi: Sage Publications
- Duverger. M. 1955. *The Political Role of Women*. New York: UNESCO
- Epstein, Cynthia Fuchs. 2006. Similarity and Difference: The Sociology of Gender Distinctions. In Janet Saltzman Chafetz (ed.). *Handbook of the Sociology of Gender*. Houston: Springer.
- Evans, Kevin raymond. 2003. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Arise Consultancies.
- Fakih, Mansour, 2001, *Analisa Gender dan Transformasi Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Flora, C.B. dan Lynn, N.B. 1974. *Women and Political Socialization: Considerations of the Impact of Motherhood*.
- Grand, Elias Le; Zenia Hellgren and Karin Halldén. 2008. Introduction: Social Stratification in Multiethnic Societies: Class And Ethnicity. In Karin Halldén, Elias Le Grand And Zenia Hellgren (Eds.). *Ethnicity And Social Divisions: Contemporary Research In Sociology*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Greenstein, F. 1965. *Children and politics*. Yale: Yale University Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2009. From 'heroes' to 'troublemakers'? Civil society and democratization in Indonesia. In Marco Bünte and Andreas Ufen (eds.). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. First published Oxon and New York: Routledge.
- Hamm, Jill V. 2000. Do Birds of a Feather Flock Together? The Variable Bases for African American, Asian American, and European American Adolescents' Selection of Similar Friends. *Developmental Psychology*. 36 (2): 209-219.
- Hart, Gillian Patricia 1976, "*Patterns of Household Labor Allocation in Javanese Village*". Singapore: A/D/C/RTM.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1991, *Sosiologi I*, Erlangga, Jakarta.
- IDEA (*Institut for Democracy and Electoral Assistance*), 1999, *Reformation and Democracy for Us Too: Politics for Women and Women for Politics*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

- Izzat, Hibbah Rauf, 1997, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jaggar, 1977, "A Political Philosophies of Women's Liberation" in Wecerling-Braggin, (M, ed) *Feminism and Philosophy*. Wesley Hartforth: Kumarian Press.
- Jewsiewicki, Bogumil. 2005. *The Formation of the Political Culture of Ethnicity in the Belgian Congo, 1920–1959*. 325-343.
- Jones, Siân. 1997. *The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present*. London and New York: Routledge.
- Kivisto, Peter. 2007. What Would a Racial Democracy Look Like? In Hernán Vera and Joe R. Feagin (eds.). *Handbook of the Sociology of Racial and Ethnic Relation*. New York: Spinger.
- Lane, Jan-Erik and Ersson, Avante. 2005. *Culture and Politics: A Comparative Approach*. Second Edition. Hants and Burlington: Ashgate Publishing Limited.
- Liddle, R. William. 1996. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. St. Leonards, New South Wales: Allen and Unwyn Pty Ltd.
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. 2009. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lloyd, Moya. 2005. *Beyond Identity Politics, Feminism, Power and Politics*. London: Sage Publications.
- .Markoff, John. 2005. Democracy. In George Ritzer (ed.). *Encyclopedia of Social Theory*. Vol 1. California, London, New Delhi: Sage Publications.
- Marsh, David dan Stiker, Gerry, 1995. *Theory and Methods in Political Science*. New York: ST. Matin Press, INC
- Mintz, Beth and Daniel H. Krymkowski. 2010. The Intersection of Race/Ethnicity and Gender in Occupational Segregation: Changes over Time in the Contemporary United States. *International Journal of Sociology*, 40 (4) pp. 31–58.
- Muthali'in, Achmad, 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ollenburger, Jane C dan Moore, Helen A, 1996, *Sosiologi Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta
- Philip, Benjamin T. and Sylvia Barack Fishman. 2006. Ethnic Capital and Inter marriage" A Case Study of American Jews. *Sociology of Religion*. 67:4 487-505.
- Poerwandari, E. Kristi, 2000, "Tersembunyi dan menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan keluarga dan Relasi personal lelaah Psikologi Feministik" dalam Poerwandari, E. Kristi dan Hidayat Rahayu Surtiati (Peny), 2000, *10 Tahun Program Sludi Kajian Wanlta: Perempuan Indonesia Dalam masyarakat Yang Tengah Berubah*, Program Studi kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Purnama, Lita, "Apa Kabar Perempuan Daerah?". *Jurnal Perempuan No 17*, , Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Randal, Vicky. 1987. *Women and Politics, an international Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rex, John. 1981. *Social Conflict: A Conceptual and Theoretical Analysis*. London, England: Longman.

- Sanderson, Stephen K., 1995, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah pengantar Studi Perempuan*, Grafiti, Jakarta.
- Sassen, Saskia. 2002. The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces for Politics. *Berkeley Journal of Sociology*, Vol. 46: 4-25.
- Schiller, Anne. 1996. An "Old" Religion in "New Order" Indonesia" Notes on Ethnicity and Religious Affiliation. *Sociology of Religion*. 57(4):409-417
- Siim, B. Irte. 2006. Citizenship. In Bryan S. Turner (ed.). *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smart, Carol. 2006. Family. In Bryan S. Turner (ed.). *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Solomos, John and Schuster, Liza. 2002. Racism, Politics, and Mobilization. In David Theo Goldberg and John Solomos (ed.). *A Companion to Racial and Ethnic Studies*. Massachusetts and Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Spalter-Roth, Roberta. 2007. Race and Ethnicity in the Labor Market; Employer Practices and Worker Strategies. In Hernán Vera and Joe R. Feagin (eds.). *Handbook of the Sociology of Racial and Ethnic Relation*. New York: Spinger.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi (The Formation of Bureaucratic Elite)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Srikanth.H and Ngaihte, Thianlalmuan. 2011. Ethnicity and Ethnic Identities in North-East India. *Man and Society: a Journal of North-East Studies*. III:125-132.
- Ugwu, Fabian O. and Chidi Ugwu. 2012. New Venture Creation: Ethnicity, Family Background and Gender as Determinants of Entrepreneurial Intent in a Poor Economy. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. 4 (4):338-357.
- Weber, Lynn and M. Elizabeth Fore. 2007. Race, Ethnicity and Health: An Intersectional Approach. In Hernán Vera and Joe R. Feagin (eds.). *Handbook of the Sociology of Racial and Ethnic Relation*. New York: Spinger.
- White, Benyamin N.F. 1976 "Problems in Estimating the Value of Work in Peasant Household Economics: An example from Rural Java" (Paper at ADC meeting at RTN Workshop on Family Labour Force use in agric. Production" Icrisat, India.
- Zuhro, R. Siti (ed). 2009. *Demokrasi Lokal. Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.

DAFTAR PUSTAKA